



Laporan Kinerja

Tahun 2025

Biro Hukum
Sekretariat Jenderal, KKP



KATA PENGANTAR

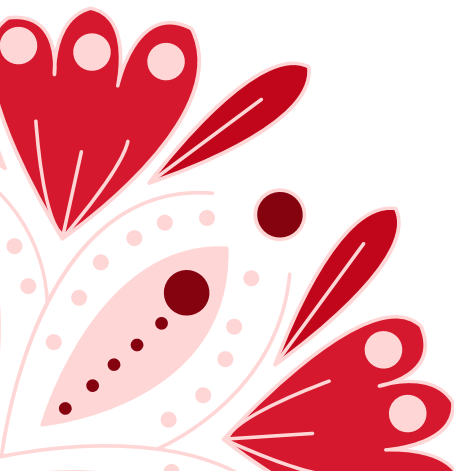
Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Biro Hukum menyajikan Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagai bentuk kewajiban konstitusional dan pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan amanat organisasi. Laporan ini disusun secara komprehensif untuk merefleksikan pencapaian target strategis serta penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di lingkungan kerja kami.

Sepanjang tahun 2025, Biro Hukum berupaya mensinkronkan antara realisasi program kerja dengan dukungan anggaran secara akuntabel. Data yang tersaji dalam dokumen ini bukan sekadar angka, melainkan instrumen evaluasi untuk mengukur efektivitas dan efisiensi birokrasi. Melalui core value "**Berbahagia Melayani, Berkinerja Sepenuh Hati**", kami membedah setiap tantangan menjadi peluang perbaikan guna memperkuat fondasi pelayanan hukum di masa depan.

Semoga laporan ini dapat menjadi referensi yang edukatif bagi para *stakeholders* dalam memantau perkembangan kinerja kami serta menjadi landasan bagi peningkatan mutu pelayanan Biro Hukum ke arah yang lebih progresif.

Jakarta, 16 Januari 2026
Kepala Biro Hukum,

Mahfudiyah



RINGKASAN EKSEKUTIF



Nilai Kinerja Organisasi
Biro Hukum Tahun 2025
sebesar 111,24%

Laporan Kinerja Biro Hukum Tahun 2025 merupakan potret komprehensif atas pelaksanaan program kerja yang dijalankan secara konsisten, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Sepanjang tahun berjalan, Biro Hukum berhasil menjaga stabilitas kinerja serta memastikan seluruh agenda strategis terlaksana selaras dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, meskipun dihadapkan pada berbagai dinamika penyesuaian program. Efektivitas kepemimpinan dan manajerial ini tercermin dari capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Biro Hukum Tahun 2025 yang mencapai 111,24%, sebuah angka yang mengonfirmasi bahwa organisasi berada pada kategori kinerja istimewa.



Anggaran 2025
Rp2.073.387.000
Realisasi 2025
Rp2.071.670.301

Keberhasilan pencapaian NKO tersebut didukung oleh pengelolaan anggaran yang akuntabel. Hingga akhir tahun 2025, realisasi anggaran Biro Hukum mencapai Rp 2.071.670.301 atau sebesar 99,92% dari total pagu anggaran. Realisasi ini mencerminkan keseimbangan antara efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan efektivitas penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian target-target strategis kementerian.

Secara substansi, dari total 15 indikator kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, seluruh realisasi kinerja Biro Hukum telah mencapai target yang ditetapkan, dengan beberapa indikator menunjukkan capaian yang signifikan, yang diantaranya adalah sebagai berikut

A. Sasaran Strategis Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP

- Indikator Kinerja Indeks Reformasi Hukum KKP yang mencapai 100 dari target 85;
- Indikator Kinerja Indeks Kualitas Kebijakan KKP yang mencapai 89,15 dari target 85;
- Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mencapai 216,67 % dari target 100%;
- Indikator Kinerja Persentase Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani yang mencapai 188,88% dari target 100%;
- Indikator Kinerja Persentase Permasalahan Hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani yang mencapai 183,33% dari target 100%;



Biro Hukum didukung
dengan 48 Pegawai

RINGKASAN EKSEKUTIF



Nilai Kinerja Organisasi
Biro Hukum Tahun 2025
sebesar 111,24%



Anggaran 2025
Rp2.073.387.000
Realisasi 2025
Rp2.071.670.301



Biro Hukum didukung
dengan Sumber Daya
Manusia sebanyak
48 Pegawai

- Indikator Kinerja Persentase Perjanjian Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Siap untuk Ditandatangani yang Ditangani yang mencapai 142,86% dari target 100%;
- Indikator Kinerja Persentase Instrumen Hukum Internasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Diberikan Pertimbangan Hukum yang mencapai 183,33% dari target 100%;
- Indikator Kinerja Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mencapai 98 dari target 92;

B. Sasaran Strategis Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum

- Indikator Kinerja Nilai PM SAKIP Biro Hukum yang mencapai 89,25 dari target 87;
- Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum yang mencapai 93,78 dari target 82;
- Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Biro Hukum yang mencapai 100% dari target 100%;
- Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hukum yang mencapai 99,92% dari target ≥ 95 ;
- Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Hukum yang mencapai 100% dari target 85%;
- Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP yang mencapai 100% dari target 100%;
- Indikator Kinerja Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Mendapatkan Predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Biro Hukum yang mencapai 85,10 dari target 75.

Capaian ini menegaskan bahwa Biro Hukum tidak hanya berfokus pada pemenuhan target administratif, namun juga berkomitmen pada penguatan tata kelola dan kualitas produk hukum secara berkelanjutan.

RINGKASAN EKSEKUTIF



Nilai Kinerja Organisasi
Biro Hukum Tahun 2025
sebesar 111,24%

Secara keseluruhan, performa tahun 2025 menunjukkan bahwa Biro Hukum mampu menjaga kualitas layanan pada bidang penyusunan regulasi, pendampingan hukum, hingga fasilitasi kerja sama lintas sektor. Ke depan, Biro Hukum akan terus memperkuat sinergi antarunit kerja dan meningkatkan kualitas pelaporan berbasis data guna memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berintegritas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rincian mendalam mengenai capaian masing-masing indikator kinerja serta analisis capaian disajikan lebih lanjut pada bagian utama laporan ini.



Anggaran 2025

Rp2.073.387.000

Realisasi 2025

Rp2.071.670.301



Biro Hukum didukung
dengan Sumber Daya
Manusia sebanyak
48 Pegawai

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Perencanaan Kinerja	9
BAB III Akuntabilitas Kinerja	13
a. Capaian Kinerja Organisasi	13
b. Analisis Capaian Kinerja	16
c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	110
d. Penghargaan yang Diraih	113
BAB IV Penutup	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kedudukan Biro Hukum	2
Gambar 2 Struktur Organisasi Biro Hukum	3
Gambar 3 Demografi Pegawai Biro Hukum	7
Gambar 4 Capaian Kinerja Biro Hukum	16
Gambar 5 Hasil Penilaian IP ASN	98
Gambar 6 Hasil Capaian IK Presentase Temuan BPK	100
Gambar 7 Hasil Capaian IK Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan	102
Gambar 8 Pelaksanaan Pengawasan WBK oleh Inspektorat I	109
Gambar 9 Pelaksanaan Penilaian WBK oleh Inspektorat V	109
Gambar 10 Grafik Pagu dan Realisasi Anggaran Biro Hukum 2020-2025	111
Gambar 11 Grafik Presentase Realisasi Anggaran Biro Hukum 2020-2025	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Target Biro Hukum tahun 2025	10
Tabel 2 Indikator Kinerja Target dan Presentase Capaian Kegiatan Biro Hukum Tahun 2025	14
Tabel 3 IK 1 Indeks Reformasi Hukum	17
Tabel 4 IK 2 Indeks Kualitas Kebijakan	21
Tabel 5 IK 3 Persentase Penyelesaian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan KKP	31
Tabel 6 IK 4 Permasalahan Hukum melalui jalur Pengadilan/Litigasi di Lingkungan KKP	36
Tabel 7 IK 5 Permasalahan Hukum di luar Jalur Pengadilan/Nonlitigasi di Lingkungan KKP yang Ditangani	49
Tabel 8 IK 6 Perjanjian Nasional Bidang KP yang siap Ditandatangani	57
Tabel 9 Inventarisasi Penyusunan Konsep Akhir rancangan Perjanjian Nasional	58
Tabel 10 Rincian Penyusunan Konsep Akhir rancangan Perjanjian Nasional	59
Tabel 11 IK 7 Perjanjian Internasional dan Instrumen Hukum Internasional Bidang KP yang Diberikan Pertimbangan Hukum	68
Tabel 12 Rincian Konsep Instrumen Hukum Internasional yang Disampaikan Kepada Biro Hukum	70
Tabel 13 IK 8 Nilai Kinerja Pengelolaan JDIH KKP	83
Tabel 14 IK 9 Nilai PM SAKIP Biro Hukum	93
Tabel 15 IK 10 IP ASN di Lingkungan Biro Hukum	96
Tabel 16 IK 11 Presentase Penyelesaian BPK di Lingkungan Biro Hukum	99
Tabel 17 IK 12 Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Hukum	101
Tabel 18 IK 13 Presentase Penyerapan Anggaran Biro Hukum	104

Tabel 19 Kinerja Anggaran	104
Tabel 20 IK 14 Presentase Penyelesaian PERMEN dan KEPMEN Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP	105
Tabel 21 IK 15 Minimal yang Dipersyaratkan untuk pembangunan Unit Kerja Berpredikat WBK lingkup Biro Hukum	108



Bab 1

Pendahuluan

BAB I

Pendahuluan

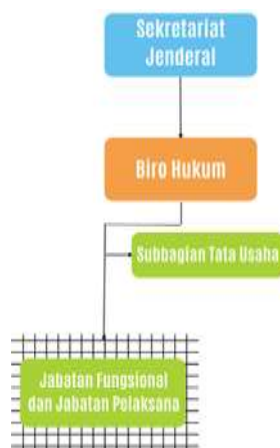
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berorientasi hasil. Sebagai bagian dari implementasi sistem tersebut, setiap unit organisasi wajib menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah direncanakan. Laporan kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian dan evaluasi, tetapi juga sebagai wujud transparansi publik atas capaian dan penggunaan sumber daya yang dikelola oleh pemerintah sepanjang satu tahun anggaran.

Biro Hukum sebagai unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian memiliki dasar hukum yang kuat, terarah, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui fungsi penyusunan dan penelaahan regulasi, advokasi hukum, fasilitasi perjanjian nasional maupun internasional, serta pengelolaan dokumentasi hukum, Biro Hukum berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis kementerian dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai hasil pelaksanaan program dan kegiatan Biro Hukum selama satu tahun anggaran. Laporan ini menguraikan capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, laporan ini menjadi dokumen evaluasi final bagi pencapaian sasaran organisasi di tahun 2025 sekaligus sebagai landasan strategis dalam penyusunan perencanaan kinerja Biro Hukum pada tahun berikutnya.

Biro Hukum dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki peran penting dalam mengoordinasikan serta menyusun berbagai instrumen hukum yang diperlukan untuk mendukung kebijakan di sektor kelautan dan perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025, Biro Hukum merupakan unit

kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang bertugas melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, instrumen hukum, serta rancangan perjanjian baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, Biro Hukum juga bertanggung jawab dalam advokasi, dokumentasi, serta penyediaan informasi hukum guna mendukung pelaksanaan tugas kementerian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Hukum didukung oleh Subbagian Tata Usaha, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, pelaporan kinerja tahunan menjadi bagian integral dalam proses evaluasi dan peningkatan akuntabilitas instansi.



Gambar 1

Kedudukan Biro Hukum

Proses pengumpulan capaian kinerja dilakukan secara berkala oleh seluruh unit kerja di lingkup Biro Hukum, dengan menyampaikan hasil pencapaian indikator kinerja triwulanan kepada pengelola kinerja Biro Hukum. Selanjutnya, pengelola kinerja menyampaikan laporan capaian tersebut kepada Biro Perencanaan dan Sekretariat Jenderal KKP melalui sistem yaitu aplikasi *Kinerjaku* (www.kinerjaku.kkp.go.id).

Pembahasan atas realisasi dan capaian kinerja, baik yang bersifat triwulanan, semesteran, maupun tahunan, dilaksanakan secara berjenjang bersama pimpinan unit kerja Biro Hukum. Proses evaluasi ini turut melibatkan koordinasi dan konsultasi dengan Ketua serta anggota Tim Teknis Pengelolaan Kinerja di lingkungan Sekretariat

Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Surat Perintah Kepala Biro Nomor B.2203/SJ.4/KP.440/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Tim Pengelolaan Kinerja pada Biro Hukum.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan capaian kinerja Biro Hukum, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang menyebabkan keterlambatan atau belum tercapainya target kinerja. Melalui laporan ini, diharapkan dapat dinilai ketepatan rencana aksi yang telah disusun dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, serta memberikan informasi yang relevan bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan. Selain itu, laporan ini menjadi sumber data penting dalam penyusunan laporan kinerja jangka menengah dan panjang, serta menjadi dasar dalam proses evaluasi dan perencanaan kinerja triwulan atau tahun berikutnya agar semakin terarah dan berkelanjutan.

a. Tugas, Fungsi, Program, dan Kegiatan Biro Hukum



Gambar 2
Struktur Organisasi Biro Hukum

Dalam menjalankan tugasnya, Biro Hukum memiliki beberapa fungsi utama. Fungsi tersebut mencakup penyiapan koordinasi dan fasilitasi dalam proses perencanaan, penelaahan, penyusunan, hingga konsultasi publik terkait rancangan peraturan perundang-undangan. Selain itu, biro ini juga berperan dalam pemantauan, analisis, serta evaluasi terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Tidak hanya terbatas pada aspek nasional, Biro Hukum juga terlibat

dalam pembahasan perjanjian dan instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan. Di samping itu, fungsi konsultasi dan advokasi hukum turut menjadi bagian dari tanggung jawabnya, guna memastikan kepatuhan hukum dalam pelaksanaan kebijakan kementerian. Sebagai bagian dari transparansi dan aksesibilitas hukum, Biro Hukum juga mengelola dokumentasi serta informasi hukum agar dapat dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan.

Dengan adanya tugas dan fungsi tersebut, Biro Hukum berperan krusial dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki landasan hukum yang kuat, serta dapat diterapkan secara efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Program dan kegiatan Biro Hukum secara konsisten mendukung pelaksanaan program Sekretariat Jenderal melalui Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Biro Hukum membawahkan/mencakup empat koordinator kelompok substansi yaitu Tim Kerja Perundang-undangan I, Tim Kerja Perundang-undangan II, Tim Kerja Perundang-undangan III, Tim Kerja Perjanjian dan Hukum Internasional, Tim Kerja Advokasi dan Bantuan Hukum, dan Tata Usaha.

1) Tim Kerja Perundang-undangan I

Tim Kerja Perundang-undangan I, yang terdiri dari pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum, bertugas dalam penyiapan koordinasi dan fasilitasi perencanaan, penelaahan, penyusunan, serta harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan. Selain itu, tim ini juga melakukan evaluasi dan bimbingan teknis terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kesekretariatan dan pengawasan internal, perikanan tangkap, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta riset sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Kerja Perundang-undangan I mengoordinasikan kelompok jabatan fungsional yang terkait dengan substansi perundang-undangan di berbagai bidang tersebut. Tugas utama tim ini meliputi penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi dalam proses perencanaan,

penyusunan, serta evaluasi kebijakan hukum, termasuk pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum.

2) Tim Kerja Perundang-undangan II

Tim Kerja Perundang-undangan II memiliki tugas serupa dengan Tim Kerja Perundang-undangan I, yaitu menyiapkan koordinasi dan fasilitasi perencanaan, penelaahan, penyusunan, serta harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan. Selain itu, tim ini juga berperan dalam evaluasi dan bimbingan teknis terkait kebijakan hukum di bidang pengelolaan ruang laut, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

Tim ini mengoordinasikan kelompok jabatan fungsional yang menangani substansi perundang-undangan di bidang-bidang tersebut, dengan tugas utama dalam penyusunan kebijakan hukum dan pelaksanaan Indeks Kualitas Kebijakan.

3) Tim Kerja Perundang-undangan III

Tim Kerja Perundang-undangan III terdiri dari pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis Kebijakan, dan Pranata Komputer. Tim ini bertanggung jawab atas koordinasi dan fasilitasi perencanaan, penelaahan, penyusunan, serta harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan, termasuk evaluasi dan bimbingan teknis di bidang perikanan budidaya, penyuluhan, dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Tim ini juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai bagian dari transparansi dan aksesibilitas informasi hukum dalam sektor kelautan dan perikanan.

4) Tim Kerja Perjanjian dan Hukum Internasional

Tim Perjanjian dan Hukum Internasional terdiri dari perancang peraturan perundang-undangan, analis hukum, dan analis kebijakan yang memiliki tugas utama dalam menyiapkan koordinasi serta memfasilitasi pembahasan rancangan perjanjian nasional dan rancangan instrumen hukum internasional. Tim ini memastikan bahwa setiap perjanjian yang dibuat sesuai dengan

kepentingan nasional serta selaras dengan prinsip dan norma hukum internasional yang berlaku.

Selain penyusunan dokumen hukum, tim ini juga melakukan analisis dampak hukum dari perjanjian yang dirumuskan serta memberikan rekomendasi kebijakan strategis yang relevan bagi kementerian.

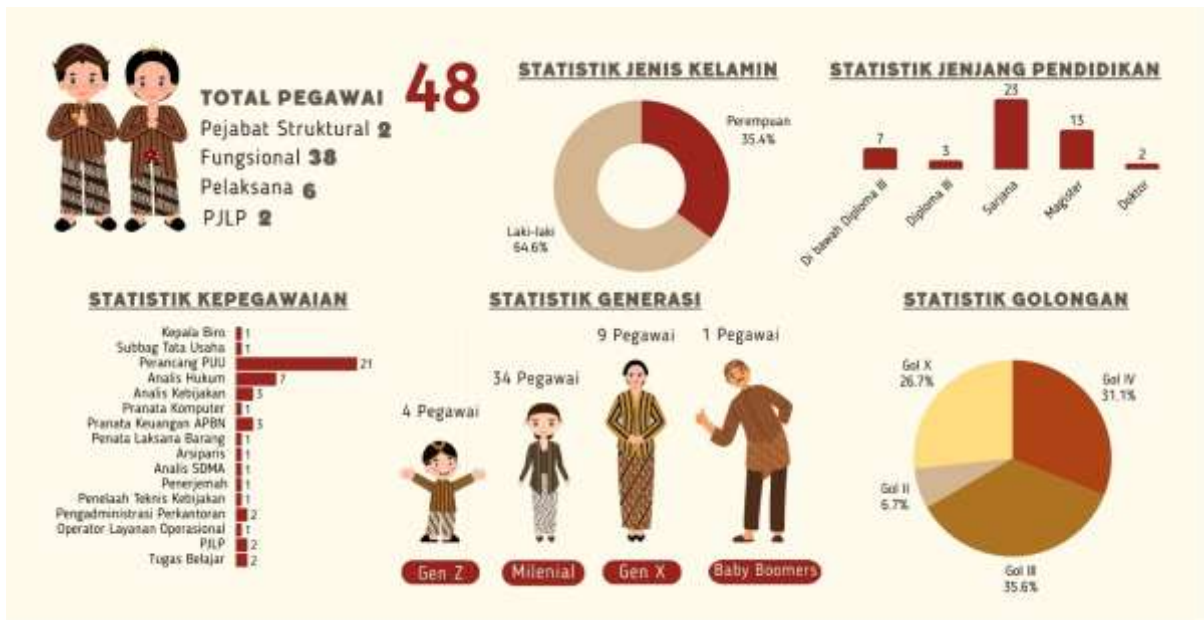
5) Tim Kerja Advokasi dan Bantuan Hukum

Tim Kerja Advokasi dan Bantuan Hukum, yang terdiri dari pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Kebijakan, bertugas dalam koordinasi dan fasilitasi konsultasi hukum, pendapat hukum, pendampingan, penyelesaian perkara hukum, serta diseminasi hukum. Selain itu, tim ini juga berperan dalam penyusunan rancangan perjanjian serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

6) Tata Usaha

Tata Usaha berperan dalam pencatatan dan pengelolaan informasi administratif yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan keputusan strategis di Biro Hukum. Kegiatan utama dalam kelompok ini mencakup perencanaan, pengelolaan kinerja, keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, kearsipan, persuratan, serta evaluasi dan pelaporan biro.

Dengan peran masing-masing tim yang saling melengkapi, Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menjalankan tugasnya secara optimal dalam mendukung kebijakan hukum di sektor kelautan dan perikanan. Biro Hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 48 pegawai, jumlah tersebut terdiri dari pejabat struktural 2 (dua), fungsional 38 (tiga puluh delapan), pelaksana 6 (enam) dan PJLP 2 (dua) yang tersebar berdasarkan jenis kelamin, jenjang Pendidikan, kepegawaian, generasi dan golongan.



Gambar 3
Demografi Pegawai Biro Hukum

b. Isu Strategis Biro Hukum

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada Tahun 2025, Biro Hukum menghadapi sejumlah tantangan strategis yang memerlukan penanganan terpadu untuk menjamin efektivitas organisasi. Pada aspek penyusunan peraturan perundang-undangan, dinamika utama muncul dari adanya irisan kewenangan dengan kementerian/lembaga lain dalam rancangan yang sedang disusun. Kondisi ini menuntut proses koordinasi yang lebih kompleks serta sinkronisasi intensif yang berdampak langsung pada kecepatan penyusunan regulasi di sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, efektivitas pembahasan substansi regulasi sangat bergantung pada keterlibatan aktif Pimpinan Tinggi Pratama selaku pemrakarsa, khususnya dalam proses harmonisasi, guna memastikan arah kebijakan yang diambil lebih tepat guna dan efisien.

Tantangan juga teridentifikasi dalam mekanisme penyusunan perjanjian, baik nasional maupun internasional. Secara normatif, setiap inisiasi kerja sama seharusnya melalui tahapan kajian internal yang komprehensif di tingkat unit organisasi eselon I sebelum disampaikan kepada unit yang menangani perjanjian dan dimintakan telaah hukum ke Biro Hukum. Namun dalam praktiknya, masih dijumpai alur yang belum sepenuhnya konsisten, seperti

penyampaian inisiasi yang langsung melompati tahapan kajian internal. Hal ini menunjukkan perlunya penyegaran pemahaman bersama mengenai tata alur penyusunan perjanjian serta peningkatan koordinasi teknis agar proses legalitas kerja sama berjalan lebih konsisten dan sesuai ketentuan. Sejalan dengan itu, guna memperkuat posisi Indonesia di forum global, penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam aspek bahasa asing, kemampuan negosiasi, serta pemahaman hukum internasional kontemporer menjadi kebutuhan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, Biro Hukum memiliki posisi strategis sebagai penggerak utama reformasi regulasi dan layanan advokasi hukum di lingkungan KKP. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025, pemberian layanan bantuan hukum yang proaktif, responsif, dan berkualitas terus ditingkatkan demi menjamin kepastian hukum. Potensi ini diperkuat dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang menyediakan akses informasi hukum yang terbuka, terintegrasi, dan akurat. Komitmen terhadap penguatan kepatuhan hukum dan mitigasi risiko kebijakan ini merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Namun demikian, seluruh upaya penguatan fungsi tersebut masih dihadapkan pada kendala keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM). Jumlah pegawai yang relatif sedikit dibandingkan dengan beban kerja yang terus meningkat baik dalam aspek regulasi, layanan JDIH, maupun litigasi menyebabkan distribusi pekerjaan tidak seimbang. Kondisi ini tidak hanya berpotensi menurunkan efektivitas dan kecepatan penyelesaian tugas, tetapi juga membatasi ruang inovasi karena sebagian besar tenaga difokuskan pada pekerjaan operasional rutin. Oleh karena itu, strategi penguatan kapasitas dan penambahan SDM yang proporsional menjadi isu prioritas agar pelaksanaan fungsi Biro Hukum dapat berjalan lebih optimal, adaptif, dan berkelanjutan di masa depan.



Bab 11

Perencanaan

Kinerja

BAB II

Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja Biro Hukum disusun sebagai bagian integral dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perencanaan ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan dasar pengukuran kinerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil sepanjang tahun anggaran 2025.

Dokumen perencanaan disusun secara berjenjang dengan memperhatikan keterkaitan antara sasaran strategis kementerian, sasaran program Sekretariat Jenderal, serta sasaran kegiatan Biro Hukum. Penyusunan ini dilakukan secara cermat dengan mengacu pada regulasi sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja KKP Tahun 2025;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP; serta
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025.

Dalam perjalanannya, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Biro Hukum Tahun 2025 mengalami 3 (tiga) kali perubahan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian organisasi terhadap pergantian kepemimpinan Kepala Biro Hukum serta sebagai langkah sinkronisasi substansi dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal 2025-2029 yang berlaku.

Melalui sinkronisasi kebijakan tersebut, Biro Hukum menetapkan dua sasaran utama sebagai arah pelaksanaan tugas dan fungsi pada Tahun 2025, yaitu:

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP.
2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Lingkup Biro Hukum.

Kedua sasaran tersebut diturunkan ke dalam 15 Indikator Kinerja yang bersifat terukur, terpantau, dan terverifikasi. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah ditandatangani pada tanggal 2 Desember 2025 oleh Kepala Biro Hukum selaku penerima mandat kinerja dan Sekretaris Jenderal selaku pemberi mandat. Dokumen ini menjadi kontrak kerja resmi guna memastikan setiap kegiatan berkontribusi langsung terhadap prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan.

Tabel 1
Target Biro Hukum tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Renstra 2025	Renja 2025	Target PK
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP	1	Indeks Reformasi Hukum KKP (indeks)	85	85	85
		2	Indeks Kualitas Kebijakan KKP (indeks)	85	85	85
		3	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)	100	100	100
		4	Persentase Permasalahan Hukum melalui Jalur Pengadilan/Litigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani (%)	100	100	100
		5	Persentase Permasalahan Hukum di Luar Jalur Pengadilan/Nonlitigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani (%)	100	100	100
		6	Persentase Perjanjian Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Siap untuk Ditandatangani (%)	100	100	100
		7	Persentase Instrumen Hukum Internasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Diberikan Pertimbangan Hukum (%)	100	100	100
		8	Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Kelautan dan Perikanan (nilai)	92	92	92
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum	9	Nilai PM SAKIP Biro Hukum (nilai)	87	87	87
		10	Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum (indeks)	82	82	82
		11	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Biro Hukum (%)	100	100	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Renstra 2025	Renja 2025	Target PK
		12	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hukum	≥95	≥95	≥95
		13	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Hukum (%)	85	85	85
		14	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP (%)	100	100	100
		15	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Mendapatkan Predikat Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Biro Hukum (nilai)	75	75	75

Sebagai bagian dari operasionalisasi perencanaan, Biro Hukum melakukan *cascading* kinerja hingga ke tingkat individu melalui dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Proses ini memastikan bahwa setiap pegawai memiliki peran dan kontribusi yang jelas serta terukur terhadap pencapaian 15 indikator kinerja unit kerja. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan SKP dilakukan secara berkala guna menjaga keselarasan antara target strategis organisasi dengan kinerja nyata individu di lapangan.

Dari sisi dukungan pendanaan, Biro Hukum pada awalnya memperoleh pagu awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp14.626.400.000. Namun, seiring dengan adanya kebijakan efisiensi di tingkat kementerian, anggaran tersebut mengalami rasionalisasi signifikan menjadi Rp2.073.387.000. Anggaran yang telah disesuaikan tersebut dialokasikan secara proporsional ke dalam empat kelompok layanan utama untuk memastikan tugas dan fungsi tetap berjalan optimal, yaitu:

- Layanan Hukum: Rp94.145.000
- Layanan Bantuan Hukum: Rp31.910.000
- Layanan Umum: Rp806.979.000
- Layanan Perkantoran: Rp1.140.353.000

Dengan demikian, perencanaan kinerja dan pengelolaan anggaran Biro Hukum Tahun 2025 dilaksanakan secara terpadu untuk menjamin keterpaduan antara aspek



perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Melalui perencanaan yang terarah serta pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel, Biro Hukum diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, memperkuat integritas organisasi, serta memberikan dukungan hukum yang berkualitas bagi seluruh program dan kebijakan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.





Bab 111

Akuntabilitas

Kinerja

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian sistematis atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk pencapaian hasil (*output*) dan manfaat (*outcome*) dari kegiatan tersebut. Selain untuk menilai pencapaian target, efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran serta sarana dan prasarana, pengukuran kinerja juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Hasil dari pengukuran kinerja memberikan gambaran sejauh mana Biro Hukum telah merealisasikan visi, misi, serta tujuan yang tertuang dalam dokumen perencanaan kinerja. Informasi yang diperoleh dari capaian kinerja ini menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan penting dalam penyusunan program dan kegiatan yang lebih baik pada periode selanjutnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Biro Hukum telah mengupayakan pencapaian kinerja melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia secara optimal. Hal ini merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dan upaya pengukuran tingkat pencapaian sasaran kegiatan secara objektif dan terukur.

Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, pengukuran kinerja memiliki peran penting untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Di lingkungan Biro Hukum, proses perencanaan, monitoring, evaluasi, pengukuran, pengumpulan, dan pelaporan kinerja dilaksanakan oleh Tim Pengelolaan Kinerja Biro Hukum. Pemantauan dan pengelolaan data kinerja dilakukan melalui dua sistem, yaitu:

- Sistem Monitoring Kinerja Biro Hukum, yang dapat diakses pada laman: <https://sites.google.com/view/simanjabirohukum/beranda>
- Aplikasi Kinerjaku, sebagai sistem pendukung pelaporan dan monitoring real-time.

Perhitungan capaian kinerja dilakukan berdasarkan formula yang telah ditetapkan dalam manual indikator kinerja, yang disahkan oleh Kepala Biro Hukum. Formula ini disusun untuk memastikan bahwa penilaian dilakukan secara objektif, terukur, dan sesuai dengan prinsip *SMART* (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-bound).

Berikut merupakan realisasi capaian kinerja Biro Hukum Tahun 2025, yang disajikan dalam bentuk tabel

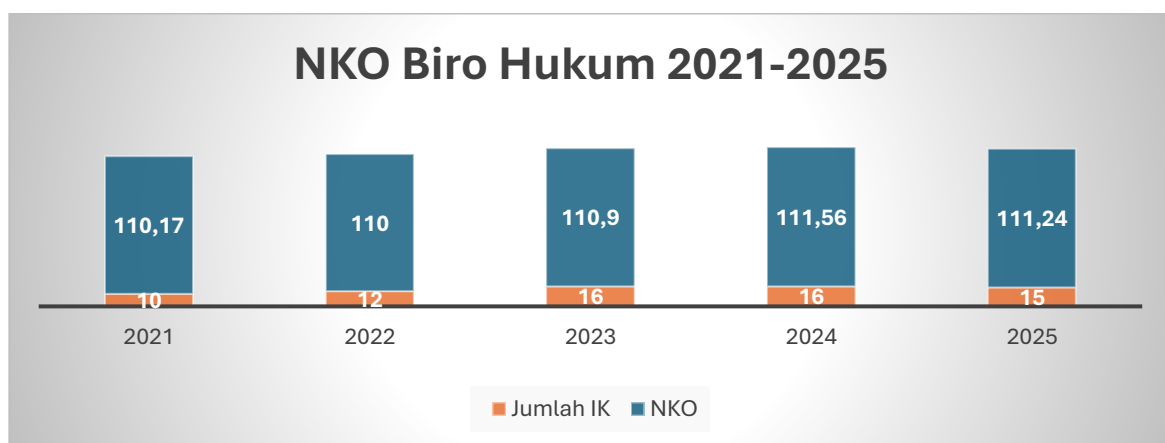
Tabel 2
Indikator Kinerja Target dan Presentase Capaian Kegiatan
Biro Hukum Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025	PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP	1	Indeks Reformasi Hukum KKP (indeks)	85	85	100	117,65
		2	Indeks Kualitas Kebijakan KKP (indeks)	85	85	89,15	104,88
		3	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)	100	100	216,67	120,00
		4	Persentase Permasalahan Hukum melalui Jalur Pengadilan/Litigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani (%)	100	100	188,88	120,00
		5	Persentase Permasalahan Hukum di Luar Jalur Pengadilan/Nonlitigasi di	100	100	183,33	120,00

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025	PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET
			Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani (%)				
		6	Persentase Perjanjian Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Siap untuk Ditandatangani (%)	100	100	142,86	120,00
		7	Persentase Instrumen Hukum Internasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Diberikan Pertimbangan Hukum (%)	100	100	183,33	120,00
		8	Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Kelautan dan Perikanan (nilai)	92	92	98	106,52
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum	9	Nilai PM SAKIP Biro Hukum (nilai)	87	87	89,25	102,59
		10	Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum (indeks)	82	82	93,78	114,37
		11	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Biro Hukum (%)	100	100	100	100,00
		12	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hukum	≥95	≥95	99,92	105,18
		13	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Hukum (%)	85	85	100	117,65
		14	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP (%)	100	100	100	100,00

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025	PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET
	15 Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Mendapatkan Predikat Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Biro Hukum (nilai)	75	75	85,10	113,47

b. Analisis Capaian Kinerja



Gambar 4
Capaian Kinerja Biro Hukum

Capaian kinerja Biro Hukum pada tahun 2025 mencapai 111,24%, yang mana capaian tersebut sudah termasuk kategori istimewa, dengan 15 ketercapaian indikator di Biro Hukum untuk mencapai NKO sebesar 111,24%.

Namun demikian, perlu disampaikan bahwa Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2025 tidak dapat sepenuhnya dibandingkan secara langsung dengan tahun sebelumnya, mengingat adanya penyesuaian pada nomenklatur indikator, serta perubahan dalam manual atau pedoman penghitungan capaian kinerja yang digunakan. Hal ini menyebabkan pendekatan evaluasi pada tahun 2025 sedikit berbeda dari tahun

sebelumnya, sehingga perbandingan dilakukan secara terbatas. Tercapaiannya Kinerja Biro Hukum pada didasarkan dengan analisis sasaran kinerja yang telah ditetapkan yaitu

1. Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Bidang Penyiapan Produk Hukum
2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum

Berikut merupakan uraian kinerja yang telah dicapai, yaitu

IK 1 Indeks Reformasi Hukum KKP

Tabel 3
IK 1 Indeks Reformasi Hukum KKP

SK-1		Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP											
IK-1		Indeks Reformasi Hukum KKP											
Realisasi 2020-2024					Realisasi Tahun 2025				Renstra Setjen 2025-2029				
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025	Target 2029	% Capaian thd Target 2029	
-	-	77,6	96,4 4	100	85	100	117,65	-	85	100	91	-	

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/SJ Tahun 2025 tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, Indeks Reformasi Hukum merupakan salah satu proses monitoring dan evaluasi dari regulasi yang telah berjalan, dengan harapan bahwa setiap regulasi yang dilaksanakan dapat tepat guna dan tepat sasaran dan tidak berbenturan dengan regulasi yang ada di tingkat atas. Penilaian Indeks Reformasi Hukum terbagi atas 4 (empat) variabel, yaitu

1. Variabel I, tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan

harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi dengan (Bobot 25);

2. Variabel II, kompetensi aparatur sipil sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas dengan (Bobot 25);
3. Variabel III, kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu dengan (Bobot 30); dan
4. Variabel IV, penataan database peraturan perundang-undangan dengan (Bobot 20) Terbangunnya JDIH yang terintegrasi dengan portal JDIHN

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/SJ Tahun 2025 tanggal 16 Januari 2025 tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, Tim Penilai telah melakukan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan telah menyerahkan Berita Acara dalam link irh.kemenkumham.go.id, berdasarkan surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri Hukum Nomor PPH-OT.03.01-121, tanggal 13 Oktober 2025, hal Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025, disimpulkan bahwa hasil Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 adalah 100.00 dengan kategori AA (Istimewa) tanpa catatan, dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut

- I. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi dengan bobot 25 KKP menyampaikan 27 peraturan yang dinilai dengan rincian
 - a. 1 (satu) Rancangan Peraturan Pemerintah yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perairan Pedalaman;
 - b. 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Presiden terdiri atas; dan
 - c. 19 (sembilan belas) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.
- II. Kompetensi aparatur sipil sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas dengan bobot 25 dengan data dukung yang dimasukan terdiri dari
 - a. Pembinaan perancang peraturan perundang-undangan berupa daftar 25 (dua

- puluh lima) perancang peraturan perundang-undangan;
- b. Pengembangan kompetensi berupa surat pernyataan bahwa perancang peraturan perundang-undangan di KKP telah mengikuti pendidikan pertama perancang peraturan perundang-undangan; dan
 - c. 25 (dua puluh lima) perancang peraturan perundang-undangan telah menyertakan sertifikat pelatihan dan bimbingan teknis perancang peraturan perundang-undangan.
- III. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu dengan bobot 30 dengan data dukung yang dimasukan terdiri dari
- a. 3 (tiga) Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan;
 - b. 16 (enam belas) target dan capaian laporan analisis dan evaluasi tahun 2024; dan
 - c. 16 (enam belas) dokumen tindak lanjut yang telah lengkap.
- IV. penataan database peraturan perundang-undangan dengan bobot 20, data dukung lengkap dengan adanya bukti penyampaian e-report.
- a. **Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**
- terdapat beberapa upaya telah dilakukan untuk mendukung keberhasilan indikator capaian implementasi Kebijakan RB yaitu
- 1. meningkatkan koordinasi melalui rapat tim internal IRH;
 - 2. mengoptimalkan peran dan kapasitas para pejabat fungsional Perancang, Analis Hukum, dan Analis Kebijakan dalam melakukan inventarisasi data dukung;
 - 3. mengadakan pertemuan dengan para tim penilai Kementerian Hukum dan HAM; dan
 - 4. melakukan reuiu terkait data dukung yang dibutuhkan.

b. Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja

Menyoroti penerapannya penganggaran berbasis kinerja dikaitkan dengan isu yang berkembang saat ini sesuai fokus pemerintah yaitu melakukan penghematan dan efisiensi anggaran. Hal tersebut sejalan dengan tujuan reformasi di bidang penganggaran yakni meningkatkan efisiensi dalam penganggaran dari tujuan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). PBK adalah sistem penganggaran yang mengaitkan antara pengalokasian dana dengan kinerja yang diharapkan. Kinerja adalah keluaran atau output dari suatu kegiatan baik berupa barang atau jasa yang dapat diukur kuantitas maupun kualitasnya. Kinerja juga diartikan sebagai sejauh mana “manfaat/hasil (outcome)” dari barang atau jasa tersebut bagi pengguna layanan. Realisasi anggaran Indeks Reformasi Hukum sebesar Rp 23.641.125.

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada tanggal 18 Desember 2025 Biro Hukum menerima piagam penghargaan sebagai Terbaik II Perolehan Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 untuk Kategori Tingkat Kementerian, yang dihadiri oleh Bapak Sekretaris Jenderal dan perwakilan Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan I.





IK 2 Indeks Kualitas Kebijakan KKP

Tabel 4
IK 2 Indeks Kualitas Kebijakan KKP

SK-1		Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP											
IK-2		Indeks Kualitas Kebijakan KKP											
Realisasi 2020-2024					Realisasi Tahun 2025				Renstra Setjen 2025-2029				
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025	Target 2029	% Capaian thd Target 2029	
-	-	49,8	83,94	83,94	85	89,15	104,88	5,21	85	89,15	-	89	

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan, Indeks Kualitas Kebijakan adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengelolaan agenda, formulasi, implementasi dan proses

evaluasi. Tujuan Indeks Kualitas Kebijakan adalah untuk mendorong penguatan partisipasi publik dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik, khususnya dalam membangun kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Adapun Manfaat Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan yaitu

1. Instrumentasi menilai kualitas kebijakan secara mudah dan cepat;
2. Mengungkapkan profil kualitas kebijakan publik nasional;
3. Media apresiasi dan advokasi kepada instansi Pemerintah sebagai pembelajaran baik dalam tata kelola kebijakan;
4. Peningkatan kualitas pembinaan Analisis Kebijakan; dan
5. Tersedianya sarana sharing pembelajaran (best practice) antar instansi Pemerintah.

Pada tahun 2025 ini, pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan diterapkan terhadap 1 (satu) profil dan 4 (empat) dimensi, yang terdiri atas:

1. profil, yaitu pelibatan Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan dalam pengukuran kualitas kebijakan dengan bobot nilai sebesar 10%;
2. perencanaan kebijakan dengan bobot sebesar 20% yang meliputi:
 - a. penyusunan kebijakan yang didasarkan pada data dan informasi yang valid, bobot nilai 40%;
 - b. keterlibatan pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan, bobot nilai 40%; dan
 - c. analisis dampak sebelum kebijakan diimplementasikan, bobot nilai 20%.
3. implementasi kebijakan dengan bobot sebesar 25% yang meliputi:
 - a. kejelasan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan, bobot nilai 35%;
 - b. efektifitas pelaksanaan kebijakan di lapangan, bobot nilai 35%; dan
 - c. mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan, bobot nilai 30%.
4. evaluasi dan keberlanjutan kebijakan dengan bobot sebesar 30% yang meliputi:

- a. adanya evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan, bobot nilai 35%;
 - b. adanya dampak yang terukur bagi masyarakat, bobot nilai 35%; dan
 - c. adanya keselarasan kebijakan dengan kebijakan lain yang relevan, bobot nilai 30%.
5. transparansi dan partisipasi publik dengan bobot sebesar 15% yang meliputi:
- a. akses informasi kebijakan oleh publik, bobot nilai 50%; dan
 - b. mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau mengajukan keberatan, bobot nilai 50%.

Pada tanggal 22 September 2025 telah dilakukan Feedback Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dihadiri oleh Koordinator Nasional Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan dari Lembaga Administrasi Negara dan KKP (perwakilan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Direktorat Jenderal PDSPKP, Direktorat Jenderal PSDKP, dan Sekretariat Jenderal (Biro Hukum, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, dan Pusat Kebijakan Strategis) dengan hasil verifikasi:

- a. kebijakan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan memperoleh nilai 100 dengan kategori unggul tanpa catatan;
- b. kebijakan pakan ikan bagi pembudidaya ikan memperoleh nilai 100 dengan kategori unggul tanpa catatan; dan
- c. kebijakan kredit usaha rakyat sektor kelautan dan perikanan memperoleh nilai 100 dengan kategori unggul dengan catatan bahwa data dukung terkait kebijakan yang memiliki dampak yang terukur bagi masyarakat (C.2) perlu dilengkapi dengan bukti testimonial berupa narasi dan/atau audio visual dari lembaga independen.

Menindaklanjuti proses feedback tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menindaklanjuti catatan verifikator 2 (dua) hari setelah proses feedback dilakukan yaitu pada tanggal 24 September 2025 dengan melengkapi data dukung pada C.2 berupa bukti testimonial berupa narasi dan/atau audio visual terkait kebijakan yang memiliki dampak yang terukur bagi masyarakat.

Hasil pengukuran indeks kualitas kebijakan pada tahun 2025 dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara pada portal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada laman portalrb.menpan.go.id serta pada website ikk.lan.go.id. Berdasarkan informasi pada website ikk.lan.go.id, KKP memperoleh nilai indeks kualitas kebijakan sebesar 89,15 dengan kategori sangat baik. Nilai tersebut telah memenuhi target indeks kualitas kebijakan pada tahun 2025 yaitu senilai 85 dengan kategori baik. Adapun rincian nilai pada setiap kebijakan yaitu:

- a. Kebijakan Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan nilai 89,8125;
- b. Kebijakan Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan dengan nilai 82,0625; dan
- c. Kebijakan Pakan Ikan bagi Pembudidaya Ikan dengan nilai 95,5625.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Penilaian IKK dilakukan sebanyak satu kali dalam dua tahun. Bila dilihat dari capaian tahun 2024, terdapat perbaikan nilai dan peningkatan nilai sebesar 49,8%. Sedangkan pada tataran nasional, tidak tersedia standar yang dapat dijadikan acuan Biro Hukum untuk dijadikan perbandingan karena penyampaian penilaian oleh LAN disampaikan secara personal kepada Kementerian PAN dan RB untuk diterbitkan pada laman Reformasi Birokrasi. Dalam pelaksanaan, terdapat beberapa upaya telah dilakukan untuk mendukung keberhasilan indikator capaian implementasi Kebijakan RB yaitu

1. meningkatkan koordinasi melalui rapat tim internal IKK;
2. mengoptimalkan peran dan kapasitas para pejabat fungsional Perancang, Analis Hukum, dan Analis Kebijakan dalam melakukan inventarisasi data dukung;
3. melengkapi data dukung dalam aspek implementasi kebijakan dan evaluasi

kebijakan;

4. memperkuat koordinasi dengan eselon I yang merupakan pemrakarsa

kebijakan; dan

5. melakukan koordinasi yang intens dengan Lembaga Administrasi Negara terkait kesesuaian data dukung yang telah dikumpulkan.

b. Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja

Menyoroti penerapannya penganggaran berbasis kinerja dikaitkan dengan isu yang berkembang saat ini sesuai fokus pemerintah yaitu melakukan penghematan dan efisiensi anggaran. Hal tersebut sejalan dengan tujuan reformasi di bidang penganggaran yakni meningkatkan efisiensi dalam penganggaran dari tujuan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). PBK adalah sistem penganggaran yang mengaitkan antara pengalokasian dana dengan kinerja yang diharapkan. Kinerja adalah keluaran atau output dari suatu kegiatan baik berupa barang atau jasa yang dapat diukur kuantitas maupun kualitasnya. Kinerja juga diartikan sebagai sejauh mana “manfaat/hasil (outcome)” dari barang atau jasa tersebut bagi pengguna layanan. Realisasi anggaran Indeks Kualitas Kebijakan sebesar Rp 58.306.979.

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja



Laporan Tahun Kinerja 2025

NO.	HARI, TANGGAL	KEGIATAN	DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	PIMPINAN RAPAT	PESERTA	BUKTI FOTO
1.	Selasa, 4 Maret 2025	Rapat Pembahasan Data Dukung Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025	Undangan Kepala Biro Hukum a.n. Sekretaris Jenderal nomor B.186/SJ.4/TU.330/II/2025, tanggal 25 Februari 2025, hal Undangan Rapat	Konferensi video	Ketua Tim Kerja Perundang-undangan II Biro Hukum	Perwakilan Ditjen PKRL, Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budi Daya, Ditjen PDSPKP, Ditjen PSDKP, Itjen, BPPMHKP, dan Setjen (Biro Perencanaan, Biro Keuangan, Biro SDMAO, Biro Hukum, Biro Humas dan KLN, Biro Umum dan PBJ, dan Pusdatin	
2.	Senin-Rabu, 2-4 Juni 2025	Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Surat Tugas Kepala Biro Hukum nomor B.363/SJ.4/KP.440/V/2025, tanggal 22 Mei 2025	Serang, Banten	Biro Hukum	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang; dan Masyarakat pesisir di wilayah Pantai Carita Serang (nelayan, pembudi daya ikan, dan pelak usaha wisata bahari)	





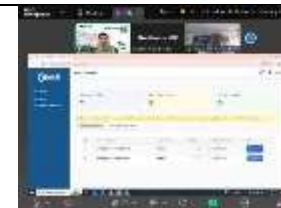
Laporan Tahun Kinerja 2025

NO.	HARI, TANGGAL	KEGIATAN	DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	PIMPINAN RAPAT	PESERTA	BUKTI FOTO
3.	Selasa- Kamis, 3-5 Juni 2025	Monitoring dan evaluasi yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: a. 25 Tahun 2022 tentang Tata Cara Rehabilitasi Lingkungan Budidaya; dan b. 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	Surat Tugas Kepala Biro Hukum nomor B.364/SJ.4/KP.440/V/20 25, tanggal 22 Mei 2025	Bandung, Jawa Barat	Biro Hukum	Ketua Tim Bidang Pembudidayaan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, pengimpor ikan hias, dan pembudidaya ikan	
4.	Selasa- Kamis, 10-12 Juni 2025	Monitoring dan evaluasi yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: a. 25 Tahun 2022 tentang Tata Cara Rehabilitasi Lingkungan Budidaya; dan b. 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	Surat Tugas Kepala Biro Hukum nomor B.379/SJ.4/KP.440/V/20 25, tanggal 26 Mei 2025	Sukabumi, Jawa Barat	Biro Hukum	Plt. Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Tawar Sukabumi, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Sukabumi, penyuluh perikanan, dan perwakilan kelompok pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan pembenihan ikan	





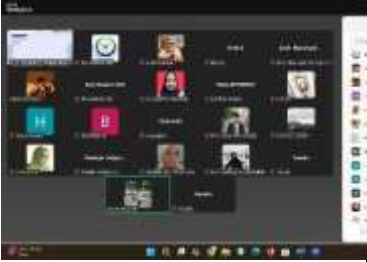
Laporan Tahun Kinerja 2025

NO.	HARI, TANGGAL	KEGIATAN	DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	PIMPINAN RAPAT	PESERTA	BUKTI FOTO
5.	Rabu, 11 Juni 2025	Sosialisasi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025	Undangan Deputy Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN) nomor 2069/D.1/KDI.01, tanggal 26 Mei 2025, hal Sosialisasi Pengukuran Nasional Indeks Kualitas Kebijakan 2025	Konferensi video	Deputy Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara	Perwakilan Instansi Pemerintah termasuk KKP (BPPSDMKP, BPPMHKP, Biro Perencanaan, Biro SDMAO, dan Biro Hukum)	
6.	Kamis, 12 Juni 2025	Rapat Pembahasan Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025	Undangan Kepala Biro Hukum a.n. Sekretaris Jenderal nomor B.426/SJ.4/TU.330/VI/2025, tanggal 11 Juni 2025, hal Undangan Rapat	Konferensi video	Ketua Tim Kerja Perundang- undangan II Biro Hukum	Perwakilan Ditjen PRL, Ditjen Pengelolaan Kelautan, Ditjen Perikanan Budi Daya, Ditjen PDSPKP, Itjen, BPPMHKP, BPPSDMKP, dan Setjen (Biro Perencanaan, Biro Keuangan, Biro SDMAO, Biro Hukum, Biro Humas dan KLN, dan Pusdatin	
7.	Rabu, 25 Juni 2025	Kick-off Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025	Undangan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 2363/K.1/KDI.02, tanggal 16 Juni 2025, hal Kick-off Pelaksanaan Pengukuran Kualitas Kebijakan Tahun 2025	Konferensi video	Kepala Lembaga Administrasi Negara	Perwakilan Instansi Pemerintah termasuk KKP (BPPMHKP, Biro SDMAO, dan Biro Hukum)	





Laporan Tahun Kinerja 2025

NO.	HARI, TANGGAL	KEGIATAN	DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	PIMPINAN RAPAT	PESERTA	BUKTI FOTO
8.	Senin, 7 Juli 2025	Rapat Pembahasan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025	Undangan Kepala Biro Hukum a.n. Sekretaris Jenderal nomor B.501/SJ.4/TU.330/VI/2025, tanggal 30 Juni 2025, hal Undangan Rapat	Ruang Rapat Biro Hukum, Lantai 3B, Gedung Mina Bahar IV	Kepala Biro Hukum	Perwakilan Lembaga Administrasi Negara dan KKP (perwakilan Biro SDMAO, Ditjen PRL, Ditjen Pengelolaan Kelautan, Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budi Daya, Ditjen PDSPKP Ditjen PSDKP, Itjen, BPPMHKP, BPPSDMKP, dan Biro Hukum)	
9.	Kamis, 17 Juli 2025	Rapat Pembahasan Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025	Undangan Kepala Biro Hukum nomor B.540/SJ.4/TU.330/VII/2025, tanggal 15 Juli 2025, hal Undangan Rapat	Konferensi video	Ketua Tim Kerja Perundang- undangan II pada Biro Hukum	Perwakilan Ditjen PRL, Ditjen PK, Ditjen PT, Ditjen PB, Ditjen PDSPKP, Itjen, BPPMHKP, BPPSDMKP, dan Setjen (Biro SDMAO, Pusat Kebijakan Strategis dan Biro Hukum);	
10.	Selasa, 22 Juli 2025	Rapat pembahasan Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (IKK KKP) Tahun 2025	Undangan Kepala Biro Hukum nomor B.556/SJ.4/TU.330/VII/2025, tanggal 21 Juli 2025, hal Undangan Rapat	Ruang Rapat Biro Hukum, Lantai 3B, Gedung Mina Bahari IV	Ketua Tim Kerja Perundang- undangan II pada Biro Hukum	perwakilan Ditjen PRL, Ditjen PB, Ditjen PDSPKP, Ditjen PSDKP, Itjen, BPPMHKP, dan Setjen (Biro Humas dan KLN, Biro Hukum, dan Pusat Kebijakan Strategis)	





Laporan Tahun Kinerja 2025

NO.	HARI, TANGGAL	KEGIATAN	DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	PIMPINAN RAPAT	PESERTA	BUKTI FOTO
11.	Jumat, 8 Agustus 2025	Rapat Pembahasan Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025	Undangan Kepala Biro Hukum nomor B. 633/SJ.4/TU.330/VIII/2025, tanggal 7 Agustus 2025, hal Undangan Rapat	Konferensi video	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum	Perwakilan Ditjen PRL, Ditjen PB, Ditjen PDSPKP, Itjen, BPPMHKP, dan Setjen (Biro Humas dan KLN, Biro Hukum, dan Pusat Kebijakan Strategis	
12.	Rabu, tanggal 13 Agustus 2025	Rapat Pembahasan Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025	Undangan Kepala Biro Hukum nomor B.642/SJ.4/TU.330/VIII/2025, tanggal 11 Agustus 2025, hal Undangan Rapat	Konferensi video	Ketua Tim Kerja Perundang-undangan II pada Biro Hukum	Perwakilan Ditjen PRL, Ditjen PB, Ditjen PDSPKP, Itjen, BPPMHKP, dan Setjen (Biro Humas dan KLN, Biro Hukum, dan Pusat Kebijakan Strategis	
13.	Senin, 22 September 2025	Feedback Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Undangan Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Jenderal nomor B.762/SJ.4/TU.330/IX/2025, tanggal 16 September 2025, hal Undangan Rapat	Konferensi video	Kepala Biro Hukum	Koordinator Nasional Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan dari Lembaga Administrasi Negara dan KKP (perwakilan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Direktorat Jenderal	



IK 3 Persentase Penyelesaian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tabel 5

IK 3 Persentase Penyelesaian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan KKP

SK-1					Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP							
IK-3					Persentase Penyelesaian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan							
Realisasi 2020-2024					Realisasi Tahun 2025				Renstra Setjen 2025-2029			
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025	Target 2029	% Capaian thd Target 2029
66,33	100	94,53	100	100	100	216,67	120,00	116,67	100	216,67	100	-

Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang harus diselesaikan adalah sebagaimana tercantum dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 serta yang diusulkan melalui mekanisme izin prakarsa di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Capaian diperoleh dari persentase perhitungan jumlah peraturan perundang undangan yang diselesaikan (penyampaian permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan) hingga 31 Desember 2025, dibandingkan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

Pada tahun 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, terdapat 30 (tiga puluh) rancangan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas 18 (delapan belas) rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan 12 (dua belas) rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 terdapat 30 (tiga puluh) rancangan peraturan perundang-undangan yang telah selesai, terdiri atas 18 (delapan belas) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan 12 (dua belas) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, sehingga persentasenya sebesar 100% (seratus persen).

Selain progsun Biro Hukum juga menyelesaikan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 sebagaimana tersebut di atas, Sampai dengan 31 Desember 2025 terdapat 35 (tiga puluh lima) rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan melalui mekanisme izin prakarsa Menteri Kelautan dan Perikanan dan telah selesai yang terdiri atas 9 (sembilan) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan 26 (dua puluh enam) Keputusan Menteri

Kelautan dan Perikanan. Persentase penyelesaian untuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang menggunakan mekanisme izin prakarsa Menteri Kelautan dan Perikanan (nonprogsun) pada tahun 2025 yaitu sebesar 100% (seratus persen).

Hasil capaian kinerja penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan:

- data capaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025; dan
- data capaian Nonprogram Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

diperoleh data sebagai berikut:

	PROGSUN		NONPROGSUN	
	YANG DIUSULKAN	YANG SELESAI	YANG DIUSULKAN	YANG SELESAI
PERMEN KP	18	18	9	9
KEPMEN KP	12	12	26	26
TOTAL	30	30	35	35
PERSENTASE	$\frac{\text{Jumlah seluruh Rancangan Permen/Kepmen yang diselesaikan}}{\text{jumlah Rancangan Permen/Kepmen yang direncanakan}} \times 100\%$			
	$\frac{30 \text{ Permen/Kepmen yang diselesaikan}}{30 \text{ Rancangan Permen/Kepmen yang direncanakan}} \times 100\% = 100\%$			

Berdasarkan data tersebut, terdapat total rancangan peraturan perundang-undangan sebagai usulan kinerja peraturan perundang-undangan yang terdiri atas 65 (enam puluh lima) rancangan Peraturan perundang-undangan yang meliputi 27 (dua

puluh tujuh) rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan 38 (tiga puluh delapan) rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Adapun persentase capaian kinerja Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 diperoleh dari jumlah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah selesai pada tahun 2025 (18 (delapan belas) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan 12 (dua belas) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang masuk dalam program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 serta 9 (sembilan) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan 26 (dua puluh enam) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang diusulkan melalui mekanisme izin prakarsa) dibagi dengan jumlah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang direncanakan yaitu sejumlah 35 (tiga puluh lima), kemudian dikalikan 100%, sehingga persentase capaian pada tahun 2025 yaitu sebesar 216,67% (dua ratus enam belas koma tiga enam tujuh persen).

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Persentase capaian penyelesaian peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 telah mencapai 100% (seratus persen), mengingat penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri ditetapkan berdasarkan norma waktu penyampaian kepada Biro Hukum masih belum melewati batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian

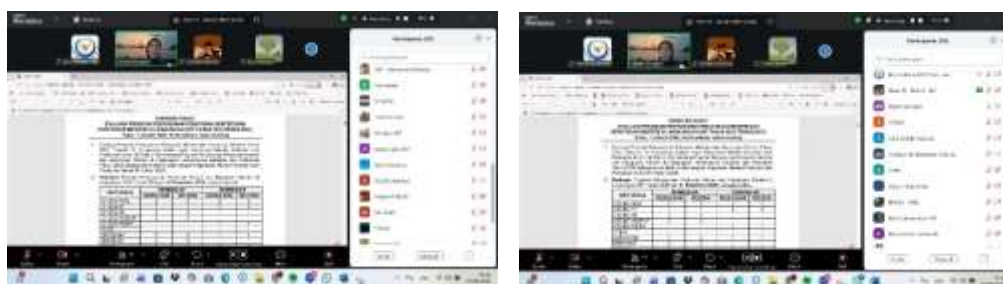
Kelautan dan Perikanan tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh koordinasi Biro Hukum bersama unit kerja eselon I yang cukup instens melalui evaluasi setiap triwulan.

b. Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja

Menyoroti penerapannya penganggaran berbasis kinerja dikaitkan dengan isu yang berkembang saat ini sesuai fokus pemerintah yaitu melakukan penghematan dan efisiensi anggaran. Hal tersebut sejalan dengan tujuan reformasi di bidang penganggaran yakni meningkatkan efisiensi dalam penganggaran dari tujuan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). PBK adalah sistem penganggaran yang mengaitkan antara pengalokasian dana dengan kinerja yang diharapkan. Kinerja adalah keluaran atau output dari suatu kegiatan baik berupa barang atau jasa yang dapat diukur kuantitas maupun kualitasnya. Kinerja juga diartikan sebagai sejauh mana “manfaat/hasil (outcome)” dari barang atau jasa tersebut bagi pengguna layanan. Realisasi anggaran Persentase Penyelesaian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 19.272.000.

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada Tanggal 7 Januari 2026 dilaksanakan Evaluasi Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan KKP Tahun 2025 melalui zoom meeting, yang dihadiri oleh perwakilan Tim Kerja Perundang-undangan I, Tim Kerja Perundang-undangan II dan Tim Kerja Perundang-undangan III.



IK 4 Permasalahan Hukum melalui jalur Pengadilan/Litigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani

Tabel 6

IK 4 Permasalahan Hukum melalui jalur Pengadilan/Litigasi di Lingkungan KKP yang Ditangani

SK-1		Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP											
IK-4		Permasalahan Hukum melalui jalur Pengadilan/Litigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani											
Realisasi 2020-2024					Realisasi Tahun 2025				Renstra Setjen 2025-2029				
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025	Target 2029	% Capaian thd Target 2029	
-	-	-	160	140	100	188,88	120	48,88	100	188,88	100	-	

Penyelenggaraan pemerintahan saat ini dihadapkan pada upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, perlindungan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan. Namun dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut seringkali timbul perbedaan dan dissinkronisasi antara normatif dan kebijakan, bahkan berujung sampai dengan adanya gugatan di lembaga peradilan. Terhadap kondisi tersebut dan meningkatnya tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini, faktanya berimplikasi langsung terhadap institusi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu semakin banyak dan beragamnya permasalahan hukum yang harus dihadapi, antara lain masalah hukum di bidang pertanahan, kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik negara (aset), perizinan usaha perikanan, dan masalah penyelenggaraan pemerintahan lainnya.

Sebagai upaya dan perwujudan dalam menjawab tantangan dan permasalahan hukum yang semakin kompleks tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah penyelesaian yang tepat dan efisien, antara lain dalam bentuk telaahan dan kajian dari berbagai aspek,

baik dari segi teknis maupun hukum (legal opinion) atau bahkan harus dilakukan pembelaan atau advokasi dengan melibatkan unit/instansi terkait lainnya. Sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, diamanatkan kepada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal bersama Bagian Hukum pada Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat Inspektorat Jenderal/Sekretariat Badan, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pemberi advokasi hukum dan memberikan pelayanan advokasi hukum (pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dan pemberian pembinaan hukum) kepada pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang aktif maupun purna tugas.

Konsekuensi logis lahirnya Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2022 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tidak semata-mata hanya fokus pada pemberian pelayanan pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dan pemberian pembinaan hukum, namun ada pembagian peran “pemberi advokasi hukum” yang juga dinilai penting dan strategis, sehingga suatu keharusan bagi pemberi advokasi hukum di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki pengetahuan dan kompetensi yang menyeluruh terhadap advokasi hukum baik pada tataran teori maupun praktik.

Permasalahan Hukum yang sudah inkraht diselesaikan melalui jalur Pengadilan/Litigasi, sebagai berikut:

1. Gugatan Praperadilan Tidak Sahnya Penghentian Penyidikan Atas Dugaan Tindak Pidana Pembangunan Pagar Laut Secara Illegal di Tengerang, Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Pst, dengan Pemohon Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) melawan Pemerintah Republik Indonesia c.q. KKP c.q. Dirjen PSDKP, putusan menyatakan gugatan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); (menang) (PSDKP)
2. Gugatan perbuatan melawan hukum register perkara Nomor 692/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait tanah dan

rumah negara di BRPBATPP Bogor, Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1064/PDT/2023/PT DKI menguatkan putusan PN Jakarta Pusat, dan tidak ada upaya hukum kasasi dari Penggugat sehingga putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (menang)

3. Gugatan Permohonan Praperadilan Register Perkara Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN.Tar, di Pengadilan Negari Tarakan, obyek praperadilan pada intinya yaitu tindakan Tergugat yang melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan, penyidikan, dan penetapan Tersangka tidak sah, oleh M.S, Warga Negara Indonesia, dan ABK Kapal A (Penggugat) melawan Kepala Kementerian Perikanan dan Kelautan cq. Ditjen PSDKP cq. Stasiun PSDKP Tarakan selaku Tergugat, putusan mengabulkan permohonan Penggugat untuk sebagian (penangkapan tidak sah) (kalah)
4. Gugatan Judicial Review Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut terhadap Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang dimohonkan oleh M.T., melalui kuasa dari Kantor MT&P Law Firm, putusan mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dan menyatakan Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan karenanya tidak berlaku untuk umum; (kalah)
5. Gugatan Class Action Nomor Perkara 122/Pdt.Sus/2025PN Kwg, terkait pembangunan PLTGU menimbulkan dampak serius pada kehidupan ekosistem laut di pesisir Pantai Kabupaten K, tanggal 28 Oktober 2025, Majelis Hakim membacakan putusan yang intinya Gugatan Perwakilan Kelompok yang diajukan para Penggugat tidak sah (KKP menang), dan Penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding;
6. Gugatan PTUN Nomor 444/G/LH/2024/PTUN.JKT terkait PKKPRL PT. M.U.P, putusan PTUN gugatan tidak dapat diterima (menang), penggugat mengajukan upaya banding;

7. Gugatan PTUN Nomor 169/G/2025/PTUN.JKT dan 170/G/2025/PTUN.JKT terkait gugatan yang diajukan oleh A dan T (keduanya Warga Desa K Kec. P, Kab T Prov B) selaku Penggugat, melawan Menteri Kelautan dan Perikanan cq. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan selaku Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Gugatan 170 (dimenangkan oleh KKP dan sedang dalam proses banding oleh Penggugat);
8. tindak pidana korupsi Pembangunan Politeknik KP D pada Pusat Pendidikan KP, BRSDM Tahun Anggaran 2017 (kalah);
9. Gugatan Tata Usaha Negara dari PT. DIA register perkara nomor 342/G/2025/PTUN.JKT di PTUN Jakarta (menang);
10. Gugatan Tata Usaha Negara Register Perkara Nomor 234/G/2025/PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (menang); dan
11. Gugatan Tata Usaha Negara Register Perkara Nomor 195/G/LH/2025/PTUN.JKT, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (menang).

Permasalahan Hukum yang belum inkraht melalui jalur Pengadilan/Litigasi, sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum perkara Nomor 175/Pdt.G/2021/PN. Mtr Penggugat: Ala R.S.M,N;
2. Perkara Nomor 75/Pdt.G.2024/PN.Trng di Pengadilan Negeri Tenggara;
3. Gugatan Nomor 368/G/LH/2024/PTUN.JKT, dengan Penggugat F.B.A, DKK terhadap Menteri Investasi/kepala BKPM selaku Tergugat;
4. Penyelesaian Ruislag Antara KKP Dengan PT. S.C;
5. Gugatan PTUN Nomor 169/G/2025/PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; dan
6. Gugatan PTUN Nomor 170/G/2025/PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Adapun persentase capaian kinerja Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani

pada tahun 2025 sebanyak 17 (sebelas) permasalahan hukum litigasi yang ditangani dibagi dengan target 9 (sembilan) permasalahan hukum litigasi yang dimintakan/dimohonkan untuk advokasi pada tahun 2025, kemudian dikalikan 100%, sehingga persentase capaian pada tahun 2025 yaitu sebesar 188,88% (seratus delapan puluh delapan koma delapan delapan persen).

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Beberapa upaya telah dilakukan untuk mendukung keberhasilan tercapainya IKU permasalahan hukum melalui jalur pengadilan/litigasi yang tertangani adalah sebagai berikut

1. inventarisasi seluruh bukti-bukti terkait permasalahan hukum;
2. bedah kasus/gelar perkara dalam rangka tindak lanjut panggilan/pemeriksaan;
3. koordinasi dengan unit kerja terkait, pertemuan koordinasi, briefing calon saksi/tersangka yang akan diperiksa, dan simulasi tanya jawab perkara;
4. koordinasi dengan aparat penegak hukum guna melakukan penjadwalan yang bisa disepakati para pihak;

b. Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja

Menyoroti penerapanan penganggaran berbasis kinerja dikaitkan dengan isu yang berkembang saat ini sesuai fokus pemerintah yaitu melakukan penghematan dan efisiensi anggaran. Hal tersebut sejalan dengan tujuan reformasi di bidang penganggaran yakni meningkatkan efisiensi dalam penganggaran dari tujuan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). PBK adalah sistem penganggaran yang mengaitkan antara pengalokasian dana dengan kinerja yang diharapkan. Kinerja adalah keluaran atau output dari suatu kegiatan baik berupa barang atau jasa yang dapat diukur kuantitas maupun kualitasnya. Kinerja juga diartikan sebagai sejauh mana “manfaat/hasil (outcome)” dari barang atau jasa tersebut bagi pengguna

layanan. Realisasi anggaran Permasalahan Hukum melalui jalur Pengadilan/Litigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani sebesar Rp 31.863.500.

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berikut merupakan kegiatan yang telah dilakukan oleh Biro Hukum dalam rangka mencapai target permasalahan hukum melalui jalur pengadilan/litigasi yang tertangani, yaitu

NO	PERMASALAHAN HUKUM	KRONOLOGI	TINDAK LANJUT
1.	Perbuatan melawan hukum perkara Nomor 175/Pdt.G/2021/PN. Mtr Penggugat: Ala R.S.M.N	Tergugat yang telah menguasai dan menyewakan pada pihak lain tanah seluas 1.530 M2 (Seribu Lima Ratus Tiga Puluh Meter persegi) tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat selaku pemilik	Kasasi
2.	Perkara Nomor 75/Pdt.G.2024/PN.Trg di Pengadilan Negeri Tenggarong	Gugatan Class Action dari M.B dkk melawan PT B.K DKK terkait kegiatan ship to ship transfer tanpa izin	Proses persidangan
3.	Gugatan Nomor 368/G/LH/2024/PTUN.JK T, dengan Penggugat F.B.A, DKK terhadap Menteri Investasi/kepala BKPM selaku Tergugat	Objek sengketa: tertulis Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor:20062210517100 001 terkait Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	Proses banding (tingkat pertama gugatan tidak dapat diterima)

NO	PERMASALAHAN HUKUM	KRONOLOGI	TINDAK LANJUT
		(PKKPRL) dengan PT M.U.P.	
4.	Gugatan PTUN Nomor 169/G/2025/PTUN.JKT dan 170/G/2025/PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	gugatan yang diajukan oleh A dan T (keduanya Warga Ds. K Kec. P Kab.T, Prov. B) selaku Penggugat, melawan Menteri Kelautan dan Perikanan cq. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan selaku Tergugat terkait pengenaan denda administratif	Inkracht (menang)
5.	Gugatan Tata Usaha Negara Register Perkara Nomor 195/G/LH/2025/PTUN.JK Tdi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	adanya Gugatan Register Perkara Nomor 195/G/LH2025/PTUN.JK T., diajukan oleh Z, A.K, A.S, Yayasan W.L.H.I, dan K R untuk Keadilan Perikanan, selaku Penggugat melawan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Tergugat terkait Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	Inkracht (menang)

NO	PERMASALAHAN HUKUM	KRONOLOGI	TINDAK LANJUT
		(PKKPRL) atas nama PT. C.P.S, dengan rincian kegiatan usaha berupa cottage apung dan dermaga wisata dengan luas lokasi 1,8 hektar dengan kedalaman 2 meter	
6.	Dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Politeknik KP D pada Pusat Pendidikan KP, BRSDM Tahun Anggaran 2017	Telah ditetapkan Tersangka atas nama Penyedia, PPK, dan PPHP Pembangunan Politeknik KP D pada Pusat Pendidikan KP, BRSDM Tahun Anggaran 2017, terkait adanya subkontrak	kalah
7.	Penyelesaian Ruislag Antara KKP Dengan PT. S.C	penyerahan tanah tambak seluas 427.440m2 yang terletak di Kab. S oleh Departemen Pertanian (sekarang menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan/ Kementerian Kelautan dan Perikanan), dengan penukaran berupa penyerahan bangunan dan prasarana teknologi pembenihan dan teknologi budidaya ikan di situbondo, pasuruan, dan sidoarjo oleh PT. S.C; ruislag tidak	Menunggu hasil pembahasan dengan BPK dan Kementerian Keuangan

NO	PERMASALAHAN HUKUM	KRONOLOGI	TINDAK LANJUT
		dapat dilanjutkan	
8.	Gugatan Praperadilan Tidak Sahnya Penghentian Penyidikan Atas Dugaan Tindak Pidana Pembangunan Pagar Laut Secara Illegal di Tangerang, Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Pst, dengan Pemohon Lembaga Pengawasan dan Pengawasan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) melawan Pemerintah Republik Indonesia c.q. KKP c.q. Dirjen PSDKP	adanya permohonan gugatan praperadilan dari Lembaga Pengawasan dan Pengawasan Penegakan Hukum Indonesia yang diwakili B.S,DKK, terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait sengkaret masalah pagar laut di perairan Tangerang, Banten.	Putusan: Gugatan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima. Penaan denda administratif.
9.	Gugatan Permohonan Praperadilan Register Perkara Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN.Tar, di Pengadilan Negari Tarakan	permohonan praperadilan Register Perkara Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN.Tar, di Pengadilan Negari Tarakan yang diajukan oleh M.S, Warga Negara Indonesia, dan ABK Kapal A (Penggugat) melawan Kepala Kementerian Perikanan dan Kelautan cq. Ditjen PSDKP cq. Stasiun PSDKP Tarakan selaku Tergugat; obyek praperadilan pada intinya yaitu tindakan Tergugat yang melakukan	pada tanggal 16 Juni 2025 telah dilaksanakan sidang dengan putusan mengabulkan permohonan Penggugat untuk sebagian (penangkapan tidak sah); dan sebagai tindak lanjut amar putusan tersebut dapat menerbitkan surat

NO	PERMASALAHAN HUKUM	KRONOLOGI	TINDAK LANJUT
		penangkapan, penahanan, penyitaan, penyidikan, dan penetapan Tersangka tidak sah	penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon kembali (penyidikan ulang)
10.	Gugatan Judicial Review Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut terhadap Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang dimohonkan M.T, melalui kuasa dari Kantor & MT&P Law Firm	Permohonan Judicial Review terhadap Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut terhadap Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	Inkracht (menang) Revisi PP 26 Tahun 2023.
11.	Gugatan TUN Nomor 368/G/LH/2024/PTUN.JK T diajukan oleh F.B.A, DKK, yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Tolak Reklamasi (AMPLTR)	Gugatan terkait terkait kerusakan lingkungan hidup akibat diterbitkannya PKKPR L PT. M.U.P	Gugatan tidak dapat diterima. PKKPR L tetap berlaku.
12.	Gugatan dari PT T.M.M selaku Penggugat, terhadap PT. G. C Indonesia selaku	Gugatan terkait perbuatan melawan hukum Penyerahan dan Pemindahan Sisa Pakan	Permohonan eksekusi pembayaran kerugian materiil

NO	PERMASALAHAN HUKUM	KRONOLOGI	TINDAK LANJUT
	Tergugat I, dan H.K selaku Tergugat II, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan cq. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya selaku Turut Tergugat X, sebagaimana	dalam rangka Percontohan Usaha Budidaya (Denfarm) Undang dalam rangka Industrialisasi Perikanan Budidaya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 4471 K/Pdt/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 152/PDT/2023/PT	tidak dapat dilakukan.
13.	Gugatan Tata Usaha Negara dari PT. D.I.A register perkara nomor 342/G/2025/PTUN.JKT di PTUN Jakarta	Objek Gugatan yaitu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pencabutan Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 dari Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (a.n Menteri Kelautan dan Perikanan) milik Penggugat pada sistem One Single Submission (OSS) pada tanggal 15 Mei 2025.	Putusan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (<i>inkracht</i>)

NO	PERMASALAHAN HUKUM	KRONOLOGI	TINDAK LANJUT
14.	Gugatan Tata Usaha Negara Register Perkara Nomor 234/G/2025/PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	panggilan relaas Panggilan Sidang Gugatan Tata Usaha Negara Nomor 234/G/2025/PTUN.JKT, tanggal 24 Juli 2025, yang diajukan oleh PT. J.M.P selaku Penggugat melawan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selaku Tergugat dan PT. B.P, selaku Pihak ke-3	Putusan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (<i>inkracht</i>) Mengadili dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara
15.	Gugatan Tata Usaha Negara Register Perkara No.195/G/LH/2025/PTUN .JKT, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	adanya Gugatan Register Perkara Nomor 195/G/LH2025/PTUN.JK T., diajukan oleh Z, A.K, A.S, Yayasan W.L.H.I, dan K R untuk Keadilan Perikanan, selaku Penggugat terhadap Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Tergugat	Putusan Majelis Hakim dalam pokok perkara : menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, dan menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara
16.	Gugatan <i>Class Action</i> Nomor Perkara 122/Pdt.Sus/2025PN	pembangunan PLTGU menimbulkan dampak serius pada kehidupan ekosistem laut di pesisir	Majelis Hakim membacakan putusan yang intinya Gugatan

NO	PERMASALAHAN HUKUM	KRONOLOGI	TINDAK LANJUT
	Kwg	Pantai Kab. K, tanggal 28 Oktober 2025	Perwakilan Kelompok yang diajukan para Penggugat tidak sah (KKP menang), dan Penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding
17.	Gugatan PTUN Nomor 169/G/2025/PTUN.JKT dan 170/G/2025/PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	gugatan yang diajukan oleh A dan T (keduanya Warga Ds. K Kec. P Kab. T Prov. B) selaku Penggugat, melawan Kementerian Kelautan dan Perikanan cq. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan selaku Tergugat terkait pengenaan denda administratif	Proses Banding dari Penggugat

IK 5 Permasalahan Hukum di luar jalur Pengadilan/Nonlitigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani

Tabel 7

IK 5 Permasalahan Hukum di luar jalur Pengadilan/Nonlitigasi di Lingkungan KKP yang Ditangani

SK-1					Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP								
IK-5					Permasalahan Hukum di luar jalur Pengadilan/Nonlitigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani								
Realisasi 2020-2024					Realisasi Tahun 2025				Renstra Setjen 2025-2029				
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025	Target 2029	% Capaian thd Target 2029	
-	-	-	100	140	100	183,33	120	43,33	100	183,33	100	-	

Penyelenggaraan pemerintahan saat ini dihadapkan pada upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, perlindungan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan. Namun dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut seringkali timbul perbedaan dan dissinkronisasi antara normatif dan kebijakan, bahkan berujung sampai dengan adanya gugatan di lembaga peradilan. Terhadap kondisi tersebut dan meningkatnya tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini, faktanya berimplikasi langsung terhadap institusi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu semakin banyak dan beragamnya permasalahan hukum yang harus dihadapi, antara lain masalah hukum di bidang pertanahan, kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik negara (aset), perizinan usaha perikanan, dan masalah penyelenggaraan pemerintahan lainnya.

Sebagai upaya dan perwujudan dalam menjawab tantangan dan permasalahan hukum yang semakin kompleks tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah penyelesaian yang

tepat dan efisien, antara lain dalam bentuk telaahan dan kajian dari berbagai aspek, baik dari segi teknis maupun hukum (legal opinion) atau bahkan harus dilakukan pembelaan atau advokasi dengan melibatkan unit/instansi terkait lainnya. Sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, diamanatkan kepada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal bersama Bagian Hukum pada Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat Inspektorat Jenderal/Sekretariat Badan, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pemberi advokasi hukum dan memberikan pelayanan advokasi hukum (pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan) kepada pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang aktif maupun purna tugas.

Permasalahan Hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi terdiri dari

- a. melalui alternatif penyelesaian sengketa;
- b. melalui arbitrase;
- c. maladministrasi melalui Ombudsman Republik Indonesia;
- d. informasi publik melalui Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia; dan
- e. melalui lembaga nonyudisial lainnya.

Alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui

- a. konsultasi;
- b. negosiasi;
- c. mediasi;
- d. konsiliasi; atau
- e. penilaian ahli.

Pemberian Bantuan Hukum melalui arbitrase meliputi

- a. pembahasan sengketa;
- b. pembuatan dokumen legalitas dalam rangka pendampingan atau mewakili penerima Advokasi Hukum;
- c. pembuatan dokumen persidangan;

- d. penyiapan saksi dan/atau ahli; dan/atau
- e. pendampingan atau mewakili penerima Advokasi Hukum pada saat persidangan di lembaga arbitrase.

Pemberian Bantuan Hukum melalui Ombudsman meliputi:

- a. pembahasan laporan atas dugaan maladministrasi;
- b. pembuatan dokumen legalitas dalam rangka pendampingan atau mewakili penerima Advokasi Hukum;
- c. pembuatan dokumen pemeriksaan;
- d. penyiapan saksi dan/atau ahli; dan/atau
- b. pendampingan atau mewakili penerima Advokasi Hukum pada saat pemeriksaan di Ombudsman Republik Indonesia.

Pemberian Bantuan Hukum melalui Komisi Informasi Pusat meliputi:

- a. pendampingan dalam pemberian pelayanan informasi publik;
- b. pembahasan sengketa;
- c. pembuatan dokumen legalitas (surat kuasa) dalam rangka pendampingan atau mewakili penerima Advokasi Hukum;
- d. pembuatan dokumen persidangan;
- e. penyiapan saksi dan/atau ahli; dan/atau
- f. pendampingan atau mewakili penerima Advokasi Hukum pada saat persidangan di Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

Pemberian Bantuan melalui lembaga nonyudisial lainnya meliputi:

- a. pembahasan pengaduan atau laporan;
- b. pembuatan dokumen legalitas (kuasa) dalam rangka pendampingan atau mewakili penerima Advokasi Hukum;
- c. pembuatan dokumen pemeriksaan/persidangan;
- d. penyiapan saksi dan/atau ahli; dan/atau
- e. pendampingan atau mewakili penerima Advokasi Hukum pada saat pemeriksaan/persidangan di lembaga nonyudisial lainnya.

Rincian Permasalahan Hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi

1. Pendampingan dan pembinaan etika pegawai di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara;
2. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pelaksanaan Hibah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. M Tahun Anggaran 2022;
3. dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Pembangunan Gedung Asrama Akademik Komunitas Kelautan dan Perikanan pada Kantor Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. W Tahun Anggaran 2015;
4. Pendampingan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidayaan Ikan di Kabupaten P;
5. 5. Pendampingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Kapal K;
6. Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan Kelas II (MYC) pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Tahun Anggaran 2022-2023;
7. Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pembangunan Budi Daya Udang Berbasis Kawasan Tahap I dan Tahap II pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022-2023;
8. Penyelesaian Ruislag Antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Dengan PT. S.C;
9. Pendampingan Permintaan Keterangan dan Dokumen oleh Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut, Ditjen PRL terkait Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Tata Kelola Tambang Nikel di Wilayah Konservasi dan Wilayah Geopark Raja Ampat, di Mabes POLRI;
10. Pendampingan Saksi dalam Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pabrik Tepung Ikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. K.B yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2016; dan

11. Sengketa Tanah Pangkalan PSDKP B, terkendala dalam proses baliknama Sertipikat.

Adapun persentase capaian kinerja Permasalahan Hukum diluar jalur pengadilan/nonlitigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani pada tahun 2025 sebanyak 11 (sebelas) permasalahan hukum nonlitigasi yang ditangani dibagi dengan target 6 (enam) permasalahan hukum nonlitigasi yang dimintakan/dimohonkan untuk advokasi pada tahun 2025, kemudian dikalikan 100%, sehingga persentase capaian pada tahun 2025 yaitu sebesar 183,33% (seratus delapan puluh tiga koma tiga persen).

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Beberapa upaya telah dilakukan untuk mendukung keberhasilan tercapainya IKU permasalahan hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi yang tertangani adalah sebagai berikut

1. inventarisasi seluruh bukti-bukti terkait permasalahan hukum;
2. bedah kasus/gelar perkara dalam rangka tindak lanjut panggilan/pemeriksaan;
3. koordinasi dengan unit kerja terkait, pertemuan koordinasi, briefing calon saksi/tersangka yang akan diperiksa, dan simulasi tanya jawab perkara; dan
4. koordinasi dengan aparat penegak hukum guna melakukan penjadwalan yang bisa disepakati para pihak.

b. Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja

Menyoroti penerapangan penganggaran berbasis kinerja dikaitkan dengan isu yang berkembang saat ini sesuai fokus pemerintah yaitu melakukan penghematan dan efisiensi anggaran. Hal tersebut sejalan dengan tujuan reformasi di bidang penganggaran yakni meningkatkan efisiensi dalam penganggaran dari tujuan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). PBK adalah sistem penganggaran yang mengaitkan antara pengalokasian dana dengan kinerja yang diharapkan. Kinerja adalah keluaran atau output dari suatu kegiatan baik berupa barang atau jasa yang

dapat diukur kuantitas maupun kualitasnya. Kinerja juga diartikan sebagai sejauh mana “manfaat/hasil (outcome)” dari barang atau jasa tersebut bagi pengguna layanan. Realisasi anggaran Permasalahan Hukum di luar jalur Pengadilan/Nonlitigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani sebesar Rp 59.503.766.

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berikut merupakan kegiatan yang telah dilakukan oleh Biro Hukum dalam rangka mencapai target permasalahan hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi yang tertangani, antara lain

NO	KEGIATAN	TINDAK LANJUT
1.	Pendampingan dan pembinaan etika pegawai di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara	menunggu sidang Majelis Kode Etik
2.	Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan Kelas II (MYC) pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Tahun Anggaran 2022-2023	telah dilakukan pendampingan hukum terhadap Sdr. S.B.W pada tanggal 16 April 2025 di Polda Metro Jaya
3.	Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pembangunan Budi Daya Udang Berbasis Kawasan Tahap I dan Tahap II pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022-2023	telah dilakukan pendampingan hukum terhadap Sdr. S.B.W (Ketua Pokja Pengadaan) pada tanggal 30 April 2025 di Polda Metro Jaya

NO	KEGIATAN	TINDAK LANJUT
4.	Penyelesaian Ruislag Antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Dengan PT. S.C	Menunggu hasil pembahasan dengan BPK dan Kementerian Keuangan
5.	Pendampingan Permintaan Keterangan dan Dokumen oleh Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut, Ditjen PRL terkait Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Tata Kelola Tambang Nikel di Wilayah Konservasi dan Wilayah Geopark Raja Ampat, di Mabes POLRI	Telah dilakukan pendampingan terhadap perkara dimaksud terhadap ibu T dan Sdr. K.Y.P, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Pertama Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut, Ditjen PRL
6.	Pendampingan Saksi dalam Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pabrik Tepung Ikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. K.B yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2016	Telah dilakukan pendampingan terhadap Sdr. B.Y, Perencana Ahli Madya, Sekretariat Ditjen PDSPKP, dalam kapasitasnya selaku Pemegang Substansi Keprograman, Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan Sdri. P.D, Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya, Direktorat Logistik, Ditjen PDSPKP, dalam kapasitasnya selaku Pemegang Substansi Teknis, Kementerian Kelautan dan Perikanan
7.	Sengketa Tanah Pangkalan PSDKP B, terkendala dalam proses baliknama Sertipikat.	Telah disampaikan surat Sekjen kepada Kapolda S.U, tanggal 15 Agustus 2025.
8.	Pendampingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Kapal S;	Telah dilakukan pemanggilan para saksi masing-masing antara 3 s.d 6 kali untuk memberikan keterangan, terakhir pada tanggal 11 Juni 2025

NO	KEGIATAN	TINDAK LANJUT
		dengan pemanggilan 5 (lima) orang saksi, namun pertanyaan masih pengulangan pertanyaan BAP sebelumnya, tidak ada substansi baru
9.	Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pelaksanaan Hibah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. M Tahun Anggaran 2022	pendampingan pemeriksaan ahli tanggal 25 April 2025 di KKP
10.	Dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Pembangunan Gedung Asrama Akademik Komunitas Kelautan dan Perikanan pada Kantor Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. W Tahun Anggaran 2015	Dilakukan beberapa kali pemanggilan saksi- saksi, terakhir tanggal 29 September sd 1 Oktober 2025; Telah dilakukan Pendampingan pemeriksaan ahli pada tanggal 18 September 2025; Akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kendari guna proses persidangan.
11	Pendampingan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidayaan Ikan di Kab	dilaksanakan pendampingan hukum terhadap Saksi dari BRPBATPP Bogor atas nama A.N, S dan Y.M.

IK 6 Perjanjian Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Siap untuk Ditandatangani

Tabel 8
IK 6 Perjanjian Nasional Bidang KP yang siap Ditandatangani

SK-1		Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Bidang Penyediaan Produk Hukum KKP											
IK-6		Perjanjian Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Siap untuk Ditandatangani											
Realisasi 2020-2024					Realisasi Tahun 2025				Renstra Setjen 2025-2029				
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025	Target 2029	% Capaian thd Target 2029	
-	-	-	109,09	121,73	100	142,86	120	21,13	100	142,86	100	-	

Perjanjian adalah kesepakatan atau pengikatan diri antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu kegiatan tertentu di bidang kelautan dan perikanan, dengan bentuk dan nama tertentu, yang dituangkan secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban serta mengikat para pihak. Untuk meningkatkan tertib pelaksanaan kegiatan kerja sama dan penyusunan perjanjian, serta perubahan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, penyusunan perjanjian di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan presentase perjanjian nasional yang siap untuk ditandatangani s.d triwulan 4, Biro Hukum melakukan proses legal drafting terhadap konsep rancangan perjanjian nasional yang disampaikan. Proses legal drafting dilakukan melalui kegiatan proses koordinasi dan fasilitasi penelaahan, penyusunan, dan pembahasan rancangan perjanjian nasional sehingga rancangan tersebut siap untuk ditandatangani. Adapun

penentuan target indikator kinerja perjanjian nasional yang siap untuk ditandatangani adalah jumlah konsep rancangan perjanjian nasional yang dimintakan tanggapan/masukan kepada Biro Hukum yang berasal dari unit kerja sama antarlembaga di lingkungan Sekretariat Jenderal. Rangkaian perjanjian tersebut menunjukkan keberhasilan Biro Hukum dalam mengoordinasikan penyusunan dokumen kerja sama yang strategis, bernilai manfaat, dan memiliki dasar hukum yang kuat. Capaian ini sekaligus memperlihatkan komitmen Biro Hukum dalam mendukung penguatan tata kelola kelembagaan dan kemitraan lintas sektor yang transparan dan akuntabel. Adapun tabel inventarisasi dan rincian penyusunan konsep akhir rancangan perjanjian nasional yang siap untuk ditandatangani disajikan sebagai berikut.

Tabel 9
Inventarisasi Penyusunan Konsep Akhir Rancangan Perjanjian Nasional

Bulan	Nota Kesepahaman/Nota Kesepakatan/Kesepakatan Bersama	Perjanjian Kerja Sama	<i>Non Disclosure Agreement</i>	Total
Januari	2	1		3
Februari	3	2		5
Maret	-	4		4
April	2	2		4
Mei	1	2		3
Juni	2	3		5
Juli	2	2		4
Agustus	1	2		3
September	1	3		4
Oktober	2	3		5
November	6	2		8
Desember	2	-		2
Total	50			

Tabel 10
Rincian Penyusunan Konsep Akhir Rancangan Perjanjian Nasional

No	Jenis Kerja Sama	Para Pihak	Tanggal Tanda Tangan	Unit Pengusul
1.	Perjanjian Kerja Sama	KKP dan PT Jatim GRHA Utama	Januari 2025	Biro Perencanaan
2.	Nota Kesepahaman	KKP dan Perpustakaan Nasional (Perpusnas)	Januari 2025	Biro Perencanaan
3.	Perjanjian Kerja Sama	Kementerian Keuangan dan KKP	Januari 2025	Biro Perencanaan
4.	Nota Kesepahaman	KKP dan Kementerian Lingkungan Hidup	Februari 2025	Biro Perencanaan
5.	Nota Kesepahaman	KKP dan Muhammadiyah	Februari 2025	Biro Perencanaan
6.	Nota Kesepakatan	Setjen KKP dan Pemerintah Kota Depok	Februari 2025	Biro Perencanaan
7.	Perjanjian Kerja Sama	Setjen KKP dan BNI	Februari 2025	Biro Perencanaan
8.	Perjanjian Kerja Sama	Setjen KKP dan BRI	Februari 2025	Biro Perencanaan
9.	Perjanjian Kerja Sama	Setjen KKP dan BNI	Maret 2025	Biro Perencanaan
10.	Perjanjian Kerja Sama	Setjen KKP dan Pushidros BNI	Maret 2025	Biro Perencanaan
11.	Perjanjian Kerja Sama	Ditjen PT dan Ditjen Penempatan KP2MI	Maret 2025	Ditjen PT
12.	Perjanjian Kerja Sama	Ditjen PT dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT)	Maret 2025	Ditjen PT
13.	Kesepakatan Bersama	KKP dan Badan Gizi Nasional (BGN)	April 2025	Biro Perencanaan
14.	Kesepakatan Bersama	KKP dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA)	April 2025	Biro Perencanaan
15.	Perjanjian Kerja Sama	Setjen KKP dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	April 2025	Biro Perencanaan

No	Jenis Kerja Sama	Para Pihak	Tanggal Tanda Tangan	Unit Pengusul
16	Perjanjian Kerja Sama	Pusat Manajemen Mutu, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan (BPPMHKP) dan Perikanan dengan Pusat Pengembangan SDM Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Badan Standardisasi Nasional (BSN)	April 2025	BPPMHKP
17	Nota Kesepahaman	KKP dan Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo)	Mei 2025	Biro Perencanaan
18	Perubahan Perjanjian Kerja Sama	Setjen KKP dan PT Jatim GRHA Utama	Mei 2025	Biro Perencanaan
19	Perjanjian Kerja Sama	BHKLN dan PT Biznet Multimedia	Mei 2025	Biro Humas dan KLN
20	Nota Kesepahaman	KKP dan Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo)	Juni 2025	Biro Perencanaan
21	Nota Kesepahaman	KKP dan Perkumpulan Prakarsa Laut Berkelanjutan dan Berkeadilan Indonesia (IOJI)	Juni 2025	Biro Perencanaan
22	Perjanjian Kerja Sama	Kementerian Keuangan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Juni 2025	Biro Perencanaan
23	Perjanjian Kerja Sama	Ditjen Perikanan Tangkap dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Pancasakti Tegal	Juni 2025	Ditjen PT
24	Perjanjian Kerja Sama	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan (BPPMHKP) dan Universitas Pertahanan	Juni 2025	BPPMHKP

No	Jenis Kerja Sama	Para Pihak	Tanggal Tanda Tangan	Unit Pengusul
25	Perjanjian Kerja Sama	Ditjen PT dan Yayasan WWF Indonesia	Juli 2025	Ditjen PT
26	Perjanjian Kerja Sama	Sekretariat Jenderal KKP dan Pushidros TNI	Agustus 2025	Biro Perencanaan
27	Kesepakatan Bersama	KKP dan Kementerian Pekerjaan Umum	Agustus 2025	Biro Perencanaan
28	Perjanjian Kerja Sama	Ditjen PT dan PT Moores Rowland Bali	Agustus 2025	Ditjen PT
29	Perjanjian Kerja Sama	Setjen KKP dan PT Jatim GRHA Utama (Adendum)	Juli 2025	Biro Perencanaan
30	Nota Kesepahaman	KKP, Tapera, dan Bank Mandiri	Juli 2025	Biro Perencanaan
31	Nota Kesepakatan	KKP dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Juli 2025	Biro Perencanaan
32	Nota Kesepahaman	Kementerian Hukum dan KKP	September 2025	Biro Perencanaan
33	Perjanjian Kerja Sama	BPPMHKP dan 4 Mitra	September 2025	BPPMHKP
34	Perjanjian Kerja Sama	BHKLN dan PT Telkomsel	September 2025	Biro Humas dan KLN
35	Perjanjian Kerja Sama	Ditjen PRL dan Fakultas Hukum UNPAD	September 2025	Ditjen PRL
36	Kesepakatan Bersama	KKP dan Kementerian Tenaga Kerja (Adendum)	Oktober 2025	Biro Perencanaan
37	Kesepakatan Bersama	KKP dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	Oktober 2025	Biro Perencanaan
38	Perjanjian Kerja Sama	Sekretariat Jenderal dan TNI AL (Pusat Hidro-Oseanografi)	Oktober 2025	Biro Perencanaan
39	Perjanjian Kerja Sama	Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Penempatan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Oktober 2025	Ditjen PT
40	Perjanjian Kerja Sama	Badan	Oktober 2025	BPPMHK



No	Jenis Kerja Sama	Para Pihak	Tanggal Tanda Tangan	Unit Pengusul
		Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan (BPPMHKP) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Organisasi Riset Tenaga Nuklir, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)		
41	Kesepakatan Bersama	KKP dan Kementerian Pariwisata	November 2025	Biro Perencanaan
42	Nota Kesepahaman	KKP dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	November 2025	Biro Perencanaan
43	Nota Kesepahaman	KKP dan Kementerian Koperasi	November 2025	Biro Perencanaan
44	Nota Kesepahaman	KKP dan Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia	November 2025	Biro Perencanaan
45	Nota Kesepahaman	KKP dan Badan Narkotika Nasional (BNN)	November 2025	Biro Perencanaan
46	Kesepakatan Bersama	KKP dan Badan Standardisasi Nasional (BSN)	November 2025	Biro Perencanaan
47	Perjanjian Kerja Sama	Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dan Dinas Perikanan Kabupaten Jepara	November 2025	Pusdatin
48	Perjanjian Kerja Sama	Ditjen Perikanan Tangkap, Kementerian Koperasi, dan Pertamina Patra Niaga	November 2025	Ditjen PT
49	Nota Kesepahaman	KKP dan Kementerian Pariwisata	Desember 2025	Biro Perencanaan
50	Nota Kesepahaman	KKP dan Nusa Tenggara Barat (NTB)	Desember 2025	Biro Perencanaan

Berdasarkan data tersebut, total konsep akhir rancangan perjanjian nasional yang diusulkan untuk proses legal drafting oleh Biro Hukum sebanyak 50 (lima puluh) rancangan perjanjian nasional yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) rancangan perjanjian nasional yang diusulkan oleh unit kerjasama antarlembaga di lingkungan Sekretariat



Jenderal dan 15 (lima belas) rancangan perjanjian nasional yang diusulkan oleh unit kerja eselon I di lingkungan KKP.

Adapun persentase capaian kinerja perjanjian nasional bidang kelautan dan perikanan yang siap ditandatangani pada tahun 2025 diperoleh dari jumlah konsep rancangan perjanjian nasional yang telah melalui proses koordinasi dan fasilitasi pembahasan, sehingga siap untuk ditandatangani sebanyak 50 (lima puluh) rancangan perjanjian nasional dibagi dengan jumlah konsep rancangan perjanjian nasional yang dimintakan tanggapan atau masukan kepada Biro Hukum yang berasal dari unit kerja sama antarlembaga di lingkungan Sekretariat Jenderal sejumlah 35 (tiga puluh lima), kemudian dikalikan 100%, sehingga persentase capaian pada tahun 2025 yaitu sebesar 142,86% (seratus empat puluh dua koma delapan enam persen).

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Beberapa upaya telah dilakukan untuk mendukung keberhasilan tercapainya IKU perjanjian nasional bidang kelautan dan perikanan yang siap untuk ditandatangani adalah sebagai berikut

1. Mengikuti tahapan pelaksanaan dari pembuatan suatu naskah perjanjian nasional di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan KKP, sebagai berikut
 - a. pelaksanaan inisiasi kerja sama antara pihak mitra dan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (seluruh unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Biro Perencanaan, dan Biro Hukum);
 - b. inisiasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan pembahasan dengan memperhatikan kriteria calon mitra kerja sama antara lain
 - 1) adanya kebutuhan yang sejalan dengan kepentingan nasional dan kebijakan strategis Kementerian;

- 2) memiliki kegiatan sejenis yang dapat dilakukan dengan unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - 3) dukungan sumber daya manusia yang memadai;
 - 4) kepemilikan sarana dan prasarana; dan
 - 5) teknologi.
2. apabila telah dilakukan inisiasi kerja sama dan pembahasan terkait rencana kerja sama yang dilakukan, Biro Perencanaan selaku unit kerja sama antarlembaga di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan mengirimkan memorandum kepada Biro Hukum dalam rangka permohonan untuk melakukan penyempurnaan dan finalisasi terhadap draf naskah perjanjian nasional;
 3. dalam hal Kerja Sama ditindaklanjuti dalam bentuk pembuatan naskah perjanjian nasional, Biro Hukum melakukan telaah dan analisis terhadap draf naskah perjanjian nasional dan melakukan penyiapan konsep akhir draf naskah perjanjian nasional; dan
 4. telaah yang dilakukan oleh Biro Hukum dilakukan dengan memperhatikan sistematika dan format naskah Perjanjian, serta kelaziman yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja

Menyoroti penerapannya penganggaran berbasis kinerja dikaitkan dengan isu yang berkembang saat ini sesuai fokus pemerintah yaitu melakukan penghematan dan efisiensi anggaran. Hal tersebut sejalan dengan tujuan reformasi di bidang penganggaran yakni meningkatkan efisiensi dalam penganggaran dari tujuan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). PBK adalah sistem penganggaran yang mengaitkan antara pengalokasian dana dengan kinerja yang diharapkan. Kinerja adalah keluaran atau output dari suatu kegiatan baik berupa barang atau jasa yang dapat diukur kuantitas maupun kualitasnya. Kinerja juga diartikan sebagai sejauh

mana “manfaat/hasil (outcome)” dari barang atau jasa tersebut bagi pengguna layanan. Realisasi anggaran Perjanjian Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Siap untuk Ditandatangani sebesar Rp 50.331.852.

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

berikut merupakan kegiatan yang telah dilakukan oleh Biro Hukum dalam rangka tercapainya IKU perjanjian nasional yang siap untuk ditandatangani adalah sebagai berikut

1. Pada tanggal 26 Mei 2025 telah dilakukan pembahasan Rencana Induk Kerja (RIK) dan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) atas Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara KKP dan RARE yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Sama dan Antar Lembaga (Biro Perencanaan) dan dihadiri *Vice President* RARE Indonesia perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi maupun Kabupaten/Kota RARE dan KKP (Ditjen PT, Ditjen Pengelolaan Kelautan, Ditjen Penataan Ruang Laut, Ditjen PSDKP, Ditjen BPPSDMKP, Biro Perencanaan, dan Biro Hukum);



2. Pada tanggal 28 Mei 2025 telah dilakukan kegiatan *Workshop* Penyusunan *Joint Marine Spatial Planning (MSP) Project* di Kawasan Teluk Balikpapan yang dibuka dan dipimpin oleh Bapak Prof. Luky Adrianto, dihadiri oleh perwakilan *Xiamen University-Fujian Institute for Sustainable Oceans* dan *Fujian Institute of Oceanography* (Prof Li Yangfan, Prof. Luo Meixue, Mr. Weng Yubin, Ms. Ye

Liangying, Ms. Luo Shuyu, Mr. Zhang Zhuohang, Mr. Zhang Ziwei), Institute Pertanian Bogor (Dr. Fery Kurniawan dan Dr. Handoko) dan KKP (Bapak Ir. Suharyanto, M.Sc., Direktur Perencanaan Ruang Perairan, Ditjen Penataan Ruang Laut, Ditjen Pengelolaan Kelautan, Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri, dan Biro Hukum);



3. Pada tanggal 23 Juni 2025 telah dilakukan Pembahasan Koordinasi Pembahasan Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Penataan Ruang Laut dan PT Danareksa yang dipimpin oleh *Center of expertise* PT Danareksa Persero dan dihadiri oleh Dirjen Penataan Ruang Laut, Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (KKP), perwakilan dari PT Danareksa, dan perwakilan dari KKP (Sesditjen Penataan Ruang Laut dan Biro Hukum);



4. pada tanggal 21 Agustus 2025 telah diselenggarakan Rapat Pembahasan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Kementerian Kelautan dan Perikanan menggunakan aplikasi zoom meeting yang dipimpin oleh Kepala Biro

Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama, Kementerian Hukum dan dihadiri oleh Kepala Biro Hukum KKP, perwakilan dari Kementerian Hukum dan KKP (Biro Perencanaan, Biro Hukum, Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP);



5. pada tanggal 9 September 2025 telah diselenggarakan Rapat Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran di Hotel Mercure Bandung yang dipimpin oleh Kepala Biro Hukum dan dihadiri oleh perwakilan dari Fakultas Hukum UNPAD, Ditjen PRL, Biro Perencanaan, dan Biro Hukum



6. pada tanggal 19 Desember 2025 telah diselenggarakan rapat pembahasan antara Inspektorat Jenderal dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang

dihadiri oleh perwakilan dari BPKP dan KKP (Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan, dan Biro Hukum).



IK 7 Perjanjian Internasional dan Instrumen Hukum Internasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Diberikan Pertimbangan Hukum

Tabel 11

IK 7 Perjanjian Internasional dan Instrumen Hukum Internasional Bidang KP yang Diberikan Pertimbangan Hukum

SK-1		Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP											
IK-7		Perjanjian Internasional dan Instrumen Hukum Internasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Diberikan Pertimbangan Hukum											
Realisasi 2020-2024					Realisasi Tahun 2025				Rancangan Renstra Setjen 2025-2029				
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025	Target 2029	% Capaian thd Target 2029	
-	-	-	120	116,67	100	183,33	120	66,66	100	183,33	100	-	

Dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu melakukan kerja sama dan apabila diperlukan membuat perjanjian internasional dalam rangka mendukung program prioritas yang ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan kerja sama dan pembuatan perjanjian tersebut dapat dilakukan dengan membuat perjanjian dengan pihak lain yang bersifat publik

dengan negara lain maupun organisasi internasional. Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Untuk meningkatkan tertib pelaksanaan kegiatan kerja sama dan penyusunan perjanjian, serta perubahan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, penyusunan perjanjian di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan presentase perjanjian internasional dan instrumen hukum internasional bidang kelautan dan perikanan yang diberikan pertimbangan hukum s.d triwulan 4, Biro Hukum melakukan pertimbangan hukum terhadap 22 konsep instrument hukum internasional yang disampaikan. Instrumen Hukum Internasional di bidang kelautan dan perikanan terdiri dari (1) Perjanjian Internasional; (2) Hukum Privat Internasional; (3) *Soft Law*.

Proses pemberian pertimbangan hukum dilakukan melalui kegiatan proses koordinasi dan fasilitasi penelaahan, penyusunan, dan pembahasan instrumen hukum internasional. Adapun penentuan target indikator kinerja instrumen hukum internasional bidang kelautan dan perikanan yang diberikan pertimbangan hukum adalah jumlah instrumen hukum internasional yang dimintakan tanggapan/masukan kepada Biro Hukum yang berasal dari unit kerja sama luar negeri di lingkungan Sekretariat Jenderal. Adapun tabel rincian konsep instrument hukum internasional yang disampaikan kepada Biro Hukum disajikan sebagai berikut

Tabel 12
Rincian Konsep Instrument Hukum Internasional yang Disampaikan Kepada Biro Hukum

No	Konsep Instrumen Hukum Internasional	Para Pihak	Keterangan	Unit Pengusul
1.	Konsep Naskah <i>Joint Statement 2025 APEC Oceans-Related Ministerial Meeting</i>	<i>APEC Economies</i> (anggota APEC)	Februari 2025	Unit organisasi eselon I
2.	Konsep Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri (<i>Grant Agreement</i>) <i>Enhancing Political Will for Sustainable Protected Areas Financing</i> dengan pendanaan GEF-7	Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan <i>United Nations Environmental Programme</i>	Maret 2025	Biro Humas dan KLN
3.	Konsep Naskah <i>Joint Communique to Promote Sustainable Fisheries Governance and Combat Illegal Unreported and Unregulated Fishing</i> antara Pemerintah Indonesia dan Thailand	Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku Perwakilan Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Thailand	Maret 2025	Biro Humas dan KLN
4.	<i>Second Protocol to Amend the Memorandum of Understanding on Marine and Fisheries Cooperation</i> antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab	Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku Perwakilan Pemerintah Indonesia dengan Kementerian Perubahan Iklim dan Lingkungan selaku perwakilan Pemerintah Persatuan Emirat Arab	April 2025	Biro Humas dan KLN
5.	<i>Memorandum of Understanding on Maritime Research and Underwater Cultural Heritage</i>	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Inovasi	April 2025	Biro Humas dan KLN

No	Konsep Instrumen Hukum Internasional	Para Pihak	Keterangan	Unit Pengusul
	<i>Management</i> antara Pemerintah Indonesia dan Australia	Nasional, <i>Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water, dan the Australian National Maritime Museum</i>		
6.	Perjanjian Hibah Luar Negeri <i>Technical Cooperation Agreement (TCA)</i> antara Indonesia dengan Perancis dengan terkait ALDFG	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan <i>Agence Française de Développement (AFD)</i>	Mei 2025	Biro Humas dan KLN
7.	<i>Memorandum Of Understanding Between The Government Of His Majesty The Sultan And Yang Di-Pertuan Of Brunei Darussalam Represented By The Ministry Of Primary Resources And Tourism And the Government Of The Republic Of Indonesia Represented By The Ministry Of Marine Affairs And Fisheries On Marine And Fisheries Cooperation,</i>	Pemerintah Indonesia dan Brunei Darussalam	Mei 2025	Unit organisasi eselon I
8.	<i>Memorandum of Understanding on Cooperation in Fisheries and Aquaculture</i>	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan <i>the Australian Center for</i>	Juni 2025	Unit organisasi eselon I

No	Konsep Instrumen Hukum Internasional	Para Pihak	Keterangan	Unit Pengusul
		<i>Internasional Agricultural Research</i>		
9.	<i>Memorandum of Understanding tentang Collaboration on Marine and Fisheries Tertiary Education, Applied Research, and Human Resources Development</i>	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan National Taiwan Ocean University	Juni 2025	Biro Humas dan KLN
10.	<i>Memorandum of Understanding on Marine and Fisheries Cooperation</i>	Pemerintah Indonesia dan Bangladesh	Juli 2025	Unit organisasi eselon I
11.	<i>Second Protocol to Amend the Memorandum of Understanding on Marine and Fisheries Cooperation antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab</i>	Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku Perwakilan Pemerintah Indonesia dengan Kementerian Perubahan Iklim dan Lingkungan selaku perwakilan Pemerintah Persatuan Emirat Arab	Agustus 2025	Biro Humas dan KLN
12.	<i>Grant agreement climate and ocean adaptation and Sustainable transition facility programme</i>	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kantor Luar Negeri, Kerja Sama, dan Pembangunan Kerajaan Besar Britania Raya dan Irlandia Utara	Agustus 2025	Biro Humas dan KLN
13.	Konsep <i>Initial Memorandum</i> Bidang Perikanan	Indonesia dalam rangka Akses ke <i>the</i>	Agustus 2025	Unit organisasi eselon I

No	Konsep Instrumen Hukum Internasional	Para Pihak	Keterangan	Unit Pengusul
	Dalam Rangka Akses Indonesia Ke Dalam the <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i> (OECD)		
14.	Joint Statement	Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP dan Kamboja Bidang Penguatan Kerja Sama Mutu	September 2025	Unit organisasi eselon I
15.	<i>Memorandum of Responsibilities of the 2026 Global Fisheries Enforcement Training Workshop</i>	KKP dan The IMCS Network Regarding the 2026 Global Fisheries Enforcement Training Workshop (GFETW)	Oktober 2025	Unit organisasi eselon I
16.	Dokumen Kerja Sama SeaBLUE Project antara BPPSDMKP dan Perikanan dan <i>United Nations Development Program</i> (UNDP)	BPPSDMKP dan Perikanan dan <i>United Nations Development Program</i>	Oktober 2025	Unit organisasi eselon I
17.	<i>Memorandum of Understanding on Marine and Fisheries Cooperation</i> Indonesia dan Mesir	KKP dan Badan Perlindungan dan Pengembangan Danau dan sumber daya Ikan Mesir	Oktober 2025	Biro Humas dan KLN
18.	<i>Mandate Agreement</i> untuk Dukungan Teknis dan <i>Transaction Advisory Services</i>	Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Asian Development Bank (ADB)	Oktober 2025	Unit organisasi eselon I



No	Konsep Instrumen Hukum Internasional	Para Pihak	Keterangan	Unit Pengusul
19.	<i>Counterdraft Memorandum of Understanding on Fisheries and Aquaculture RI-Hungaria</i>	KKP dan Kementerian Pertanian Hungaria	November 2025	Biro Humas dan KLN
20.	<i>Memorandum of Understanding</i> antara KKP dengan Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kamboja	KKP dan Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kerajaan kamboja	Desember 2025	Biro Humas dan KLN
21.	Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri GEF-8 <i>Implementing Arrangement between the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and the Food and Agriculture Organization of the United Nations</i>	KKP dan FAO	Desember 2025	Biro Humas dan KLN
22.	Kerja Sama antara KKP dengan <i>Rosyth Royal Dockyard Limited (Babcock International)</i> untuk Kegiatan yang Dibiayai oleh Pinjaman Luar Negeri dari Pemerintah Inggris	KKP dan Babcock International	Desember 2025	Unit organisasi eselon I

Berdasarkan data tersebut, jumlah instrumen hukum internasional yang diberikan pertimbangan hukum oleh Biro Hukum sebanyak 22 (dua puluh dua) instrumen hukum internasional yang terdiri dari 12 (dua belas) instrumen hukum internasional yang diusulkan oleh unit kerja sama luar negeri di lingkungan Sekretariat Jenderal dan 10 (sepuluh) instrumen hukum internasional yang diusulkan oleh unit kerja eselon I di lingkungan KKP.

Adapun persentase capaian kinerja instrumen hukum internasional yang diberikan pertimbangan hukum pada tahun 2025 diperoleh dari jumlah instrumen hukum internasional yang diberikan pertimbangan hukum sebanyak 22 (dua puluh dua)

instrumen hukum internasional dibagi dengan jumlah instrumen hukum internasional yang dimintakan tanggapan/masukan kepada Biro Hukum yang berasal dari unit kerja sama luar negeri di lingkungan Sekretariat Jenderal sejumlah 12 (dua belas), kemudian dikalikan 100%, sehingga persentase capaian pada tahun 2025 yaitu sebesar 183,33% (seratus delapan puluh tiga koma tiga persen).

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Beberapa upaya telah dilakukan untuk mendukung keberhasilan tercapainya IKU instrumen hukum internasional bidang kelautan dan perikanan yang diberikan pertimbangan hukum adalah sebagai berikut

1. melakukan rapat pembahasan dengan Biro Perencanaan dan/atau Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dimana pada rapat pembahasan tersebut juga mengundang unit kerja eselon I di KKP atau kementerian/lembaga lain untuk mengakomodasi masukan terkait permohonan audiensi kerja sama yang berasal dari pihak mitra;
2. melakukan rapat pembahasan dengan Biro Perencanaan, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, dan/atau unit kerja eselon I untuk menindaklanjuti pembahasan awal yang telah dilakukan dengan mengundang pihak mitra pengusul kerja sama tersebut. Pada rapat tersebut dilakukan penyamaan persepsi antara pihak mitra dengan KKP terkait tujuan kerja sama, tanggung jawab masing-masing pihak, dan ketentuan lain yang perlu diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. melakukan pembahasan dengan kementerian atau lembaga terkait diantaranya adalah Kementerian Perdagangan dan/atau Kementerian Luar Negeri terkait dengan posisi Indonesia dalam perundingan atau perjanjian internasional yang sedang dalam tahapan negosiasi.

b. Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja

Menyoroti penerapan anggaran berbasis kinerja dikaitkan dengan isu yang berkembang saat ini sesuai fokus pemerintah yaitu melakukan penghematan dan efisiensi anggaran. Hal tersebut sejalan dengan tujuan reformasi di bidang anggaran yakni meningkatkan efisiensi dalam anggaran dari tujuan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). PBK adalah sistem penganggaran yang mengaitkan antara pengalokasian dana dengan kinerja yang diharapkan. Kinerja adalah keluaran atau output dari suatu kegiatan baik berupa barang atau jasa yang dapat diukur kuantitas maupun kualitasnya. Kinerja juga diartikan sebagai sejauh mana “manfaat/hasil (outcome)” dari barang atau jasa tersebut bagi pengguna layanan. Realisasi anggaran Perjanjian Internasional dan Instrumen Hukum Internasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Diberikan Pertimbangan Hukum sebesar Rp 1.250.000.

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berikut merupakan kegiatan yang telah dilakukan oleh Biro Hukum dalam rangka tercapainya IKU Instrumen Hukum internasional bidang kelautan dan perikanan yang telah diberikan pertimbangan hukum

1. Rapat Pembahasan Rencana Hibah Luar Negeri dari *Green Climate Fund* dengan *United Nation for Industrial Development Organisation* dilaksanakan pada tanggal 14 April 2025, secara daring melalui aplikasi konferensi video, yang dipimpin oleh Ketua Kelompok Kerja Kerja Sama Multilateral, dan dihadiri perwakilan dari UNIDO, dan KKP (Setditjen Pengelolaan Kelautan, Dit. Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Dit. Konservasi Ekosistem, Setditjen Penataan Ruang Laut, Setditjen Perikanan Budi Daya, Dit. Rumput Laut, Setditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Dit. Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Dit.

Pemberdayaan Usaha, Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri, dan Biro Hukum);



2. Pertemuan dengan *International Monitoring, Controlling and Surveillance Network*, dilaksanakan pada tanggal 21 April 2025, secara daring melalui aplikasi konferensi video, yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Kerja Sama Multilateral, dan dihadiri perwakilan dari Setditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Dit. Prasarana dan Sarana Pengawasan, Dit. Pengendalian Operasi Armada, Dit. Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Dit. Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Dit. Penanganan Pelanggaran, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, dan Biro Hukum;



3. Pertemuan Pembahasan *Counterdraft Memorandum of Understanding* antara Pemerintah Indonesia dan Brunei Darussalam dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2025, dihadiri oleh perwakilan dari Directorate of Fisheries, Ministry of Primary Resources and Tourism, Brunei Darussalam, Kementerian Luar Negeri, dan KKP (Setditjen Penataan Ruang Laut, Setditjen Pengelolaan Kelautan, Setditjen Perikanan Tangkap, Setditjen Perikanan Budi Daya, Setditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Setditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Set. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Set. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri, dan Biro Hukum);



4. Rapat Rencana Pendanaan Hibah Luar Negeri Implementasi *Agreement Under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction* dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2025, secara daring melalui aplikasi konferensi video, yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pengelolaan Pendanaan Luar Negeri, dan dihadiri perwakilan dari GIZ-Indonesia, FAO Indonesia, dan KKP (Ibu Tini Martini selaku Perancang Perundang-Undangan Ahli Utama, Setditjen Penataan Ruang Laut, Dit. Perencanaan Ruang Perairan, Setditjen Pengelolaan

Kelautan, Dit. Konservasi Ekosistem, Dit. Konservasi Spesies dan Genetik, Dit. Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Biro Perencanaan, Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri, dan Biro Hukum);



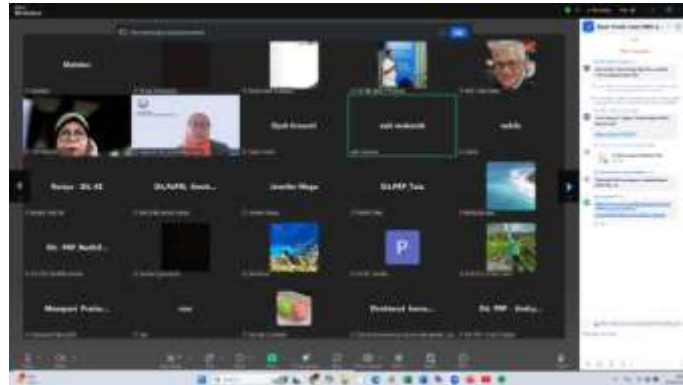
5. Rapat Koordinasi Perkembangan Isu dan Akselerasi Ratifikasi Persetujuan Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) dilaksanakan secara *hybrid* pada tanggal 20 Mei 2025, bertempat di Ruang Rapat Kawaluso, yang dipimpin oleh Dirjen Penataan Ruang Laut dan Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Kepala Biro Humas dan KLN, Kepala Biro Hukum, Sesditjen PRL, Perwakilan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional dan Dirjen Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri, Deputy Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, Deputy Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Sekretariat Kabinet, Badan Riset dan Inovasi Nasional;



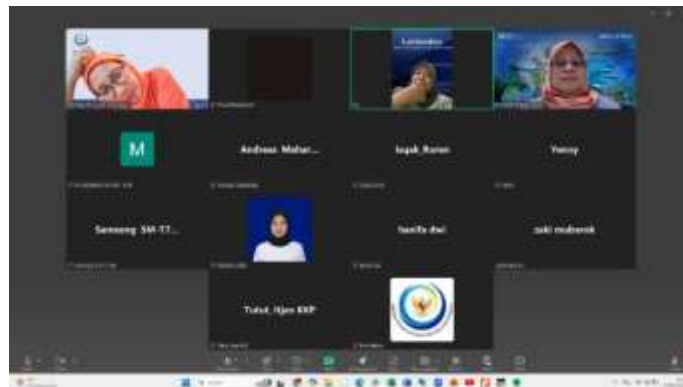
6. Pertemuan *Bilateral Meeting to Discuss the Proposed Harmonised Text of Regulation in the Fishing Sector* dilaksanakan pada tanggal 2 dan 4 Juni 2025, di kantor ILO Menara Thamrin, yang dibuka oleh *Director ILO Indonesia and Timor Leste*, dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan KKP (Dit. Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Dit. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Biro Hukum);



7. Rapat pembahasan tindaklanjut atas Ratifikasi BBNJ pada tanggal 20 Juni 2025 melalui Zoom Meeting yang dipimpin oleh Direktur PRL dihadiri oleh Staf Khusus Bidang Penataan Ruang Laut dan Kerjasama Luar Negeri, Tenaga Ahli Bidang Penataan Ruang, Konservasi, dan Kerjasama Internasional, Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi, Kepala Biro Humas dan KLN, KapusPerancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama, Perwakilan Dit PRP, Dit Konservasi Spesies dan Genetik, Setditjen PK, Setditjen PRL, dan Biro Hukum;



8. Persiapan The First Consultive Meeting of the Atsea RCC



9. the First Consultative Meeting of the ATSEA Regional Coordination Committee (RCC), pertemuan dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2025 secara daring dihadiri oleh perwakilan dari Australia, Papua Nugini, delegasi Indonesia hadir secara fisik di Ruang Rapat Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri, antara lain perwakilan dari Kementerian Luar Negeri dan KKP (Setditjen Penataan Ruang Laut, Setditjen Pengelolaan Kelautan, Setditjen Perikanan Tangkap, Dit. Penanganan Pelanggaran, Set. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri, dan Biro Hukum);



10. Kerja Sama dengan Rosyth Royal Dockyard Limited (Babcock International) untuk Kegiatan yang Dibiayai oleh Pinjaman Luar Negeri dari Pemerintah Inggris.



IK 8 Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tabel 13
IK 8 Nilai Pengelolaan JDIH KKP

SK-1		Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP											
IK-8		Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Kelautan dan Perikanan											
Realisasi 2020-2024					Realisasi Tahun 2025				Renstra Setjen 2025-2029				
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025	Target 2029	% Capaian thd Target 2029	
-	80	89	96	99	92	98	106,52	-1	92	98	96	-	

Pada tahun 2025, pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus diarahkan untuk memperkuat tata kelola informasi hukum yang efektif, terpadu, dan dapat diakses oleh publik. Pengelolaan JDIH KKP dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan dokumentasi, pengelolaan, serta penyebarluasan informasi hukum di KKP.

Dalam pelaksanaannya, Biro Hukum melalui Tim Teknis Pengelola JDIH KKP yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/SJ Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Nomor 33/SJ Tahun 2025, telah menjalankan berbagai kegiatan penguatan kelembagaan dan pengelolaan sistem informasi hukum. Kegiatan tersebut mencakup pemutakhiran dokumen hukum, pembinaan anggota jaringan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kerja

sama antarinstansi dalam rangka optimalisasi fungsi JDIH sebagai pusat rujukan hukum di sektor kelautan dan perikanan.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Hingga akhir tahun 2025, **JDIH KKP** telah mengelola dan mempublikasikan berbagai dokumen hukum melalui situs resmi <https://jdih.kkp.go.id/>. Secara kuantitatif, capaian koleksi dokumen hukum yang telah dimutakhirkan dan diunggah selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Koleksi Dokumen	Jumlah Dokumen
1	Peraturan Pemerintah	1
2	Peraturan Presiden	3
3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan	29
4	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan	90
5	Keputusan a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan	45
6	Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan	4
7	Surat Edaran	3

Capaian tersebut menunjukkan peningkatan konsistensi pengunggahan dokumen hukum dibandingkan periode sebelumnya, sekaligus menggambarkan komitmen JDIH KKP dalam menjaga keterkinian dan kelengkapan informasi hukum sebagai wujud transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Selain pengelolaan koleksi dokumen hukum, Biro Hukum juga berperan aktif dalam pengembangan jaringan dan penguatan kelembagaan JDIH, baik melalui kerja

sama antaranggota jaringan maupun asistensi teknis kepada unit kerja di lingkungan KKP yang memiliki simpul JDIH.

b. Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja

Menyoroti penerapan penganggaran berbasis kinerja dikaitkan dengan isu yang berkembang saat ini sesuai fokus pemerintah yaitu melakukan penghematan dan efisiensi anggaran. Hal tersebut sejalan dengan tujuan reformasi di bidang penganggaran yakni meningkatkan efisiensi dalam penganggaran dari tujuan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). PBK adalah sistem penganggaran yang mengaitkan antara pengalokasian dana dengan kinerja yang diharapkan. Kinerja adalah keluaran atau output dari suatu kegiatan baik berupa barang atau jasa yang dapat diukur kuantitas maupun kualitasnya. Kinerja juga diartikan sebagai sejauh mana “manfaat/hasil (outcome)” dari barang atau jasa tersebut bagi pengguna layanan. Realisasi anggaran Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 10.400.000.

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang telah dilakukan terkait pengelolaan JDIH KKP pada tahun 2025, yaitu

1. menerima kunjungan JDIH Kota Semarang ke JDIH KKP pada tanggal 9 Oktober 2025 di Ruang Rapat Biro Hukum Lantai 14 Gedung Mina Bahari IV;



2. menerima kunjungan JDIH Provinsi Jawa Tengah ke JDIH KKP pada tanggal 13 Oktober 2025 di Ruang Rapat Biro Hukum Lantai 14 Gedung Mina Bahari IV;



3. menerima kunjungan JDIH Badan Nasional Pengelola Perbatasan ke JDIH KKP pada tanggal 14 Oktober 2025 di Ruang Rapat Biro Hukum Lantai 14 Gedung Mina Bahari IV;



4. konsultasi dan koordinasi ke Pusat JDIH Nasional pada tanggal 23 Oktober di Gedung Badan Pembinaan Hukum Nasional;



5. menghadiri rapat koordinasi evaluasi kinerja pengelolaan JDIH tahun 2024 pada tanggal 27 Oktober 2025 di Ruang Rapat Lantai 2 Selatan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;



6. asistensi penyusunan abstrak peraturan perundang-undangan dan pengolahan dokumen hukum pada tanggal 28 Oktober 2024 di Ruang Rapat Besar, Wisma Gracillaria;



7. menerima kunjungan JDIH Badan Pengawas Obat dan Makanan ke JDIH KKP pada tanggal 11 November 2025 di Ruang Rapat Biro Hukum Lantai 3B Gedung Mina Bahari IV;



8. menerima kunjungan JDIH Kota Jakarta Timur ke JDIH KKP pada tanggal 18 November 2025 di Ruang Rapat Biro Hukum Lantai 14 Gedung Mina Bahari IV;



9. menerima kunjungan JDIH Kementerian Kehutanan ke JDIH KKP pada tanggal 19 November 2025 di Ruang Rapat Biro Hukum Lantai 14 Gedung Mina Bahari IV;



10. menerima kunjungan JDIH Kejaksaan Agung ke JDIH KKP pada tanggal 27 November 2025 di Ruang Rapat Biro Hukum Lantai 14 Gedung Mina Bahari IV;



11. menerima kunjungan JDIH Komisi Pemilihan Umum ke JDIH KKP pada tanggal 28 November 2025 di Ruang Rapat Biro Hukum Lantai 14 Gedung Mina Bahari IV;



12. menerima kunjungan JDIH Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ke JDIH KKP pada tanggal 4 Desember 2025 di Ruang Rapat Biro Hukum Lantai 14 Gedung Mina Bahari IV;



13. asistensi pengolahan dokumen dan informasi hukum berbasis website pada tanggal 8 Desember 2025 di Ruang Rapat Biro Hukum Lantai 3B Gedung Mina Bahari IV;



14. menghadiri bimbingan teknis pengelolaan JDIH pada tanggal 11 Desember 2025 di Kementerian Koordinator Bidang Pangan;



15. menghadiri monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada tanggal 15 Desember 2025 secara daring; dan



16.menerima kunjungan JDIH Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ke JDIH KKP pada tanggal 15 Desember 2025 di Ruang Rapat Biro Hukum Lantai 14 Gedung Mina Bahari IV.



IK 9 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hukum

Tabel 14
IK 9 Nilai PM SAKIP Biro Hukum

SK-2		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum											
IK-9		Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hukum											
Realisasi 2020-2024					Realisasi Tahun 2025				Renstra Setjen 2025-2029				
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025	Target 2029	% Capaian thd Target 2029	
-	-	-	87,6	88,50	87	89,25	102,59	0,75	87	89,25	87,8	-	

Nilai PM SAKIP Biro Hukum merupakan IK yang menggantikan IK Nilai Rekonsiliasi Kinerja. Adapun IK ini dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021

tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni

- perencanaan kinerja (30%),
- pengukuran kinerja (30%),
- pelaporan kinerja (15%),
- evaluasi kinerja (25%).

Nilai PM SAKIP Setjen adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Inspektorat Jenderal atas implementasi SAKIP di Biro Hukum dengan kategori penilaian sebagai berikut

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Berdasarkan Surat Dinas Sekretaris Jenderal Nomor B.911/SJ/RC.610/IX/2025 tanggal 11 September 2025 perihal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2025, Biro Hukum memperoleh nilai SAKIP sebesar 89,25 dengan kategori A (Sangat Baik). Nilai ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dan konsistensi penerapan manajemen kinerja dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Secara berurutan, perbandingan nilai SAKIP Biro Hukum selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun	Nilai	Predikat	Keterangan
2023	87,60	A	Sangat Baik
2024	88,50	A	Memuaskan
2025	89,25	A	Memuaskan – Meningkatkan

Tren capaian tersebut menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 0,82 poin per tahun. Peningkatan ini menggambarkan adanya penguatan konsistensi antara dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, serta optimalisasi peran koordinatif Biro Hukum dalam mendukung tata kelola organisasi Sekretariat Jenderal. Adapun capaian ini diperoleh dengan adanya

Secara umum, peningkatan nilai SAKIP Biro Hukum Tahun 2025 didorong oleh beberapa aspek penting, yaitu:

1. Penyusunan dokumen perencanaan kinerja yang semakin berkualitas dan berbasis hasil (outcome-based planning).
2. Penguatan validasi indikator kinerja melalui koordinasi intensif dengan Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal.
3. Optimalisasi pengukuran kinerja triwulanan melalui aplikasi kinerjaku.kkp.go.id.
4. Pelaporan kinerja berbasis analisis efektivitas, efisiensi, dan manfaat terhadap pencapaian sasaran strategis.
5. Penguatan tindak lanjut hasil evaluasi internal serta penerapan sistem pengawasan berbasis risiko (SPIP).

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan SAKIP, Biro Hukum terus melakukan inovasi dalam sistem informasi dan tata kelola kinerja, antara lain:

1. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Biro Hukum (SIMANJA) – platform digital yang memuat fitur pelacakan realisasi kinerja, capaian indikator, dan pelaporan anggaran.

2. Implementasi paraf elektronik (e-paraf) untuk mempercepat proses validasi dokumen kerja sama dan pelaporan antarunit.
3. Integrasi data capaian kinerja organisasi dan individu (SKP) melalui matriks cascading hasil kerja.
4. Peningkatan kualitas laporan kinerja dengan pendekatan analisis berbasis hasil (result-based reporting).
5. Penyelarasan indikator kinerja organisasi dengan arah kebijakan Sekretariat Jenderal dan KKP secara keseluruhan.

Dalam menunjang capaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hukum didukung oleh seluruh perwakilan dari tim kerja. Untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai output sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro Hukum. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2025, realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 34.343.000.

IK 10 Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Biro Hukum

Tabel 15
IK 10 IP ASN di Lingkungan Biro Hukum

SK-2		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum											
IK-10		Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Biro Hukum											
Realisasi 2020-2024					Realisasi Tahun 2025				Renstra Setjen 2025-2029				
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025	Target 2029	% Capaian thd Target 2029	
72,56	82,03	84,03	89,64	90,18	82	93,78	114,37	3,6	82	93,78	84	-	

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN Biro Hukum yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatir Sipil Negara.

Berdasarkan nota dinas Kepala biro SDM Aparatur dan Organisasi nomor 8/SJ.3/TU.210/I/2026SJ, tanggal 4 Januari 2026 hal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan KKP Triwulan IV/Semester II Tahun 2025 dan Target Capaian IP ASN KKP Tahun 2026, capaian IP ASN Biro Hukum memperoleh nilai 93,78 dengan (kategori Tinggi) terdiri dari Kualifikasi 23,11, Kompetensi 36,49, Kinerja 29,19, dan Disiplin 5.

Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2024, terdapat peningkatan capaian sebesar 3,6%, Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Biro Hukum untuk mencapai target, yaitu

1. Pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) oleh seluruh pegawai di lingkup Biro Hukum sebagai bagian dari sistem manajemen kinerja individu yang sejalan dengan pengelolaan kinerja organisasi; dan
2. Pembaruan data kepegawaian pada aplikasi e-Pegawai, guna memastikan data kepegawaian tetap mutakhir dan akurat sebagai dasar dalam proses administrasi dan pengambilan keputusan.

No	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1	Staf Ahli Menteri	25	25	27,5	5	82,5
2	Biro Perencanaan	23,82	33,44	25,1	5	87,36
3	Biro Keuangan	23,14	34,85	26,47	5	89,46
4	Biro SDMAO	21,93	36,08	27,57	5	90,58
5	Biro Hukum	23,11	36,49	29,19	5	93,78
6	Biro HKLN	22,68	31,98	25,98	5	85,64
7	Biro Umum	23,15	34,15	25,15	5	87,45
8	Biro PBJ	21,78	35,39	25,39	5	87,56
9	Pusdatin	22,22	34,4	26,23	5	87,85
10	BPISKP	23,44	32,06	25,62	5	86,12
11	Puskajis	25	36,39	27,14	5	93,54
	Total	21,71	34,47	26,18	5	88,37 (Tinggi)

Gambar 5
Hasil Penilaian IP ASN Tahun 2025
Per Unit Kerja Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal

Dalam menunjang capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2025 per Unit Kerja Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal didukung oleh seluruh pegawai Biro Hukum. Untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai output sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro Hukum. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2025, realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 3.584.000.

IK 11 Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Biro Hukum
Tabel 16
IK 11 Presentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Biro Hukum

SK-2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum												
IK-11	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Biro Hukum												
Realisasi 2020-2024					Realisasi Tahun 2025				Renstra Setjen 2025-2029				
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025	Target 2029	% Capaian thd Target 2029	
-	100	100	100	101	100	100	100	-1	100	100	-	-	

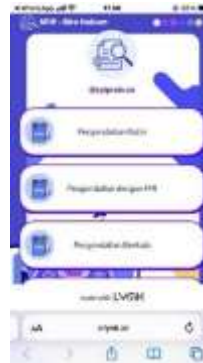
Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Biro Hukum merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. berdasarkan nota dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 136/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 12 Januari 2026, hal Capaian IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK Unit Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal, Biro Hukum mendapatkan nilai 100%.



No	Unit Kerja	Nilai Temuan (Rp)	Nilai Tindak Lanjut Temuan (Rp)	Sisa (Rp)	Persentase Nilai Temuan (%)
1	Biro Perencanaan	-	-	-	100
2	Biro SDMAO	54.779.662	54.779.662	0	100
3	Biro Hukum	8.262.281	8.262.281	0	100
4	Biro Keuangan dan BMN	-	-	-	100
5	Biro Umum dan PBJ	1.790.413.665	1.790.413.665	0	100
6	Pusdatin	-	-	-	100
7	LPMUKP	31.819.633	31.819.633	0	100
8	BPISDKP	-	-	-	100
9	TP	-	-	-	100
Total		1.885.275.241	1.885.275.241	0	100

Gambar 6
Hasil Capaian IK Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Setjen

Bila dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, tidak terdapat penurunan capaian, dapat diartikan bahwa Biro Hukum konsisten dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, selain itu untuk memitigasi adanya temuan, Biro Hukum memiliki metode penyelenggaraan SPIP melalui portal informasi SPIP dengan alamat tautan lynk.id/spiprokum. Dengan adanya sistem satu pintu tersebut, proses penyelenggaraan SPIP dapat terintegrasi melalui satu pintu. Hal tersebut meningkatkan koordinasi dan transparansi dalam pengendalian risiko yang terjadi di setiap triwulannya. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang terkontrol dengan baik, Biro Hukum dapat melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap proses bisnis yang dijalankan, sekaligus meningkatkan kinerja dalam penyelesaian temuan BPK. Pendekatan ini mendukung tata kelola keuangan yang lebih akuntabel dan profesional.



Dalam menunjang capaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkup Biro Hukum. Untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai output sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro Hukum. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2025, realisasi penyerapan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 510.000

IK 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Hukum

Tabel 17

IK 12 Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Hukum

SK-2		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum										
IK-12		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Hukum										
Realisasi 2020-2024					Realisasi Tahun 2025				Renstra Setjen 2025-2029			
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025	Target 2029	% Capaian thd Target 2029
45	100	100	100	100	85	100	117,65	-	85	100	-	-

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, reviu, dan evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan. Berdasarkan nota dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Nomor 55/SJ.2/TU.140/I/2026, tanggal 7 Januari 2026, hal Capaian IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV Tahun 2025, tidak terdapat rekomendasi atau tindak lanjut yang perlu diselesaikan oleh Biro Hukum, sehingga nilai capaian Biro Hukum mencapai 100%.

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Biro Perencanaan	31	31	100%	0	0%
2	Biro SDMAO	12	12	100%	0	0%
3	Biro Hukum	3	3	100%	0	0%
4	Biro Keuangan dan BMN	20	20	100%	0	0%
5	Biro Umum dan PBJ	8	8	100%	0	0%
6	Pusdatin	7	7	100%	0	0%
7	LPMUKP	3	3	100%	0	0%
8	BPISDKP	5	5	100%	0	0%
Total		89	89	100%	0	0%

Gambar 7
Hasil Capaian IK Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan di Lingkungan Setjen

Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi hasil pengawasan telah dimanfaatkan secara optimal melalui tindak lanjut yang nyata, baik berupa perbaikan sistem tata laksana, penyesuaian kebijakan internal, maupun peningkatan kualitas pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas. Langkah-langkah tersebut dilakukan dengan memperhatikan prinsip *good governance*, transparansi, dan akuntabilitas,

sehingga hasil pengawasan menjadi instrumen penting dalam mendorong perbaikan berkelanjutan di lingkungan Biro Hukum.

Untuk mempertahankan capaian kinerja yang telah diperoleh dan meningkatkan kualitas pengawasan di periode selanjutnya, Biro Hukum menerapkan langkah-langkah strategis antara lain:

- meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Tim Kerja SPIP dan seluruh pegawai Biro Hukum;
- menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan oleh Inspektorat Jenderal secara tepat waktu dan berkelanjutan;
- memperkuat pengendalian internal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum; dan
- melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rekomendasi hasil pengawasan;

Dalam menunjang capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Hukum oleh perwakilan Tim Kerja SPIP dan seluruh pegawai Biro Hukum. Untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai output sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro Hukum. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2025 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Hukum dilaksanakan tanpa menggunakan anggaran.

IK 13 Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hukum

Tabel 18
IK 13 Presentase Penyerapan Anggaran Biro Hukum

SK-2		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum											
IK-13		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Hukum											
Realisasi 2020-2024					Realisasi 2025				Renstra Setjen 2025-2029				
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025	Target 2029	% Capaian thd Target 2029	
-	-	-	99,31	99,72	95	99,92	105,18	0,2	95	99,92	-	-	

Dalam menunjang tugas dan fungsi yang dimandatkan kepada Biro Hukum, diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai output sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro Hukum. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang disusun satu tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan. Pagu beserta realisasi anggaran Biro Hukum pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut

Tabel 19
Kinerja Anggaran

Rincian Output	Pagu	Realisasi	%
Layanan Hukum	Rp94.145.000	Rp93.778.466	99,61
Layanan Bantuan Hukum	Rp31.910.000	Rp31.863.500	99,85
Layanan Umum	Rp806.979.000	Rp806.508.179	99,94
Layanan Perkantoran	Rp1.140.353.000	Rp1.139.520.156	99,93
Total	Rp2.073.387.000	Rp2.071.670.301	99,92

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Umum Nomor 65/SJ.6/KU.130/I/2026 tanggal 9 Januari 2026, hal Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2025 Lingkup Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 Biro Hukum mencapai Rp2.071.670.301 atau 99,92% dari total pagu anggaran. Realisasi ini menunjukkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan sekaligus menggambarkan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian target kinerja.

Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2024, terdapat kenaikan capaian sebesar 0,2%. Upaya yang dilakukan untuk tercapainya Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hukum adalah

- a. menyusun perencanaan anggaran secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
- b. Menampilkan target dan realisasi anggaran tahun 2025 Doa Pagi yang dilaksanakan setiap hari rabu agar seluruh tim kerja di lingkungan Biro Hukum dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang sudah ditentukan;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran secara berkala; dan
- d. memastikan kelengkapan administrasi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan.

Monitoring dan evaluasi kegiatan Biro Hukum dan anggaran secara berkala. Dalam menunjang capaian Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hukum oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan Pemegang Uang Muka Kerja. Untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai *output* sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro Hukum. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2025 Penyerapan Anggaran Biro Hukum dilaksanakan tanpa menggunakan anggaran.

IK 14 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP

Tabel 20

IK 14 Presentase Penyelesaian Program Penyusunan PERMEN dan KEPMEN Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP

SK-2		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum											
IK-14		Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP											
Realisasi 2020-2024					Realisasi Tahun 2025				Renstra Setjen 2025-2029				
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025	Target 2029	% Capaian thd Target 2029	
-	-	100	100	100	100	100	100	-	100	100	-	-	

Sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyiapkan dokumen perencanaan, termasuk untuk rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023. Penyusunan Keputusan Menteri dimaksud merupakan rutinitas tahunan dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

Berdasarkan nota dinas Kepala Biro Hukum kepada pimpinan unit organisasi eselon II terkait, Nomor 50/SJ.4/TU.210/II/2026, tanggal 6 Januari 2026, hal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2025, yang pada intinya menyatakan bahwa tanggung jawab Biro Hukum dalam penyelesaian peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian kelautan dan Perikanan Tahun 2025 yaitu 1 (satu) rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, sehingga persentase penyelesaian sebesar 100% (seratus persen), dan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2024, tidak terdapat peningkatan dan penurunan yaitu tetap 100% (seratus persen).

Dalam menunjang capaian persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 serta untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai *output* sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro Hukum. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2025, realisasi anggaran sebesar Rp 5.076.500

IK 15 Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi lingkup Biro Hukum

Tabel 21

IK 12 Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk pembangunan Unit Kerja Berpredikat WBK lingkup Biro Hukum

SK-2		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum											
IK-15		Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi lingkup Biro Hukum											
Realisasi 2020-2024					Realisasi Tahun 2025				Renstra Setjen 2025-2029				
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025	Target 2029	% Capaian thd Target 2029	
-	-	-	-	88,75	75	85,10	113,47	-3,65	75	85,10	-	-	

Biro Hukum, sebagai unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, terus melaksanakan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) secara terstruktur, sistematis, dan berkesinambungan.

Pada Oktober 2025, Inspektur I melakukan asistensi terhadap pelaksanaan pembangunan ZI di Biro Hukum. Asistensi ini bertujuan untuk memantau kemajuan seluruh proses pembangunan ZI, termasuk aspek manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasil asistensi menunjukkan bahwa Biro Hukum telah menunjukkan pencapaian yang positif, dengan nilai total 92,30, melebihi ambang batas minimal 75 untuk predikat WBK, serta capaian setiap komponen pengungkit dan hasil berada di atas standar yang ditetapkan.



Gambar 8
Pelaksanaan Pengawasan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi oleh Inspektorat I

Selanjutnya, pada tanggal 27 Oktober – 3 November 2025, penilaian resmi pembangunan Zona Integritas menuju WBK dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) KKP yang dipimpin oleh Inspektur V. Penilaian ini akan menjadi acuan resmi untuk menetapkan predikat WBK Biro Hukum, sekaligus mengukur capaian integritas, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.



Gambar 9
Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi oleh Inspektorat V

Hasil dari penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI), Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor 1/ITJ/HK.410/I/2026 tanggal 6 Desember 2025, hal Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, penilaian pembangunan ZI menuju WBK lingkup KKP tahun 2025 berdasarkan tim penilai internal

Biro Hukum telah memenuhi persyaratan sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK di lingkungan KKP Tahun 2025

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini tidak lepas dari komitmen dan kerja sama Kepala Biro Hukum beserta seluruh pegawai yang terlibat. Untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai output sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro Hukum. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2025 realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 20.236.675.

c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

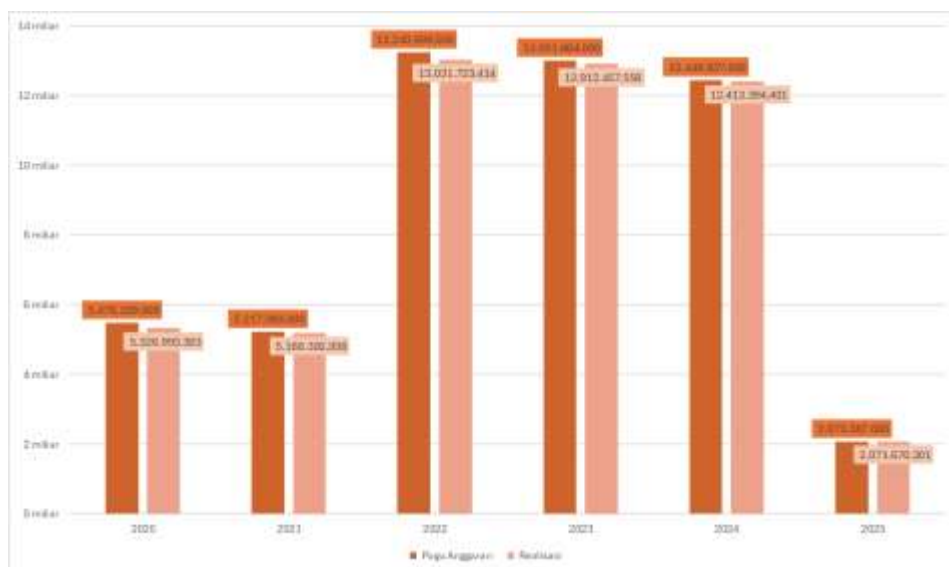
Menyoroti penerapan penganggaran berbasis kinerja dikaitkan dengan isu yang berkembang saat ini dimana fokus Pemerintah adalah melakukan penghematan dan efisiensi anggaran. Dimana hal tersebut sejalan dengan tujuan reformasi dibidang penganggaran yakni meningkatkan efisiensi dalam penganggaran dari tujuan penerapan penganggaran berbasis kinerja (PBK). PBK adalah sistem penganggaran yang mengkaitkan antara pengalokasian dana dengan kinerja yang diharapkan. Kinerja adalah keluaran atau output dari suatu kegiatan baik berupa barang atau jasa yang dapat diukur kuantitas maupun kualitasnya. Kinerja juga diartikan sebagai sejauhmana “manfaat/hasil (outcome)” dari barang atau jasa tersebut bagi pengguna layanan Hukum. Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target dengan data yg digunakan meliputi

- Data capaian Nilai Kinerja Organisasi Biro Hukum pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id;
- Data alokasi anggaran dan realisasi anggaran Biro Hukum

Berdasarkan perhitungan nilai efisiensi penggunaan sumber daya di Lingkungan Biro Hukum sebesar 110% dengan rincian sebagai berikut

NKO	Pagu Anggaran	Realisasi	%	%NSPS X Anggaran	Efisiensi Anggaran	%
1	2	3	4	5=1x2	6=5-3	7=(6/2)x100
111.24	Rp 2,073,387,000.00	Rp 2,071,670,301.00	99.92	Rp 230,643,569,880.00	Rp 228,571,899,579.00	110%

Biro Hukum merupakan salah satu unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan perjanjian, hukum internasional bidang kelautan dan perikanan, advokasi, dokumentasi, dan informasi hukum. Dalam menunjang tugas tersebut, Biro Hukum didukung oleh 49 pegawai dan diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai output sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro Hukum. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan. Pagu beserta realisasi anggaran Biro Hukum pada tahun 2020 sampai 2025 sebagaimana tabel berikut



Gambar 10
Pagu dan Realisasi Anggaran Biro Hukum Tahun 2020-2025



Gambar 11
Grafik Presentase Realisasi Anggaran Biro Hukum TA 2020-2025

Biro Hukum memaksimalkan penyerapan anggaran agar dapat mengakomodir kegiatan-kegiatan yang sudah dijadwalkan sebelum pemotongan anggaran. Rendahnya capaian realisasi anggaran Tahun 2024 dikarenakan terdapat optimalisasi pelaksanaan anggaran untuk mencapai target program dan kegiatan di lingkungan Biro Hukum, yang terdiri dari

1. mengumpulkan data atau bahan usulan melalui grup whatsapp, kemudian setelah terkumpul baru akan diadakan pembahasan, *offline*, dengan itu bisa memangkas pertemuan yang menggunakan anggaran.
2. pemanfaatan teknologi dan informasi yaitu rapat koordinasi yang dilaksanakan secara *zoom meeting*;
3. penandatanganan Autentifikasi PUU telah dilaksanakan secara elektronik melalui portal;
4. wadah untuk menghimpun semua data yang diperlukan terkait tugas dan fungsi di Biro Hukum telah dilaksanakan secara *paperless* melalui *google drive* dan *drop box*;
5. optimalisasi sharing informasi melalui *group whatsapp*; dan

6. monitoring dan evaluasi secara berkala pengendalian resiko yang sudah ditindaklanjuti melalui tautan lynk.id/spiprokum sebagai portal informasi SPIP Terintegrasi Biro Hukum; dan
7. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja melalui <https://sites.google.com/view/simanjabirohukum/beranda>.

d. Penghargaan yang Diraih

Tahun 2025, Biro Hukum meraih penghargaan dari pihak eksternal KKP. Hal ini menjadi suatu pembuktian atas kinerja Biro Hukum dan pemacu untuk berkinerja dengan lebih baik. Berdasarkan surat dinas a.n Menteri Hukum dan HAM, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Nomor PPH-OT.03.01-121, tanggal 13 Oktober 2025, hal Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil mencapai nilai indeks reformasi hukum sebesar 100 dengan kategori AA (Istimewa). KKP berhasil menerima penghargaan Terbaik II Kategori Tingkat Kementerian Hasil Penilaian Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2025.





Bab IV

Kesimpulan

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Hasil

Berdasarkan hasil analisis terhadap Capaian kinerja Biro Hukum Tahun 2025 sebesar 111,24. Terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain realisasi beberapa kegiatan yang telah dicapai, yaitu

1. Berdasarkan surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum atas nama Menteri Hukum, Nomor PPH-OT.03.01-121, tanggal 13 Oktober 2025, hal Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mendapatkan nilai Indeks Reformasi Hukum 100 (seratus) dengan kategori AA (Istimewa) serta KKP berhasil menerima penghargaan Terbaik II Kategori Tingkat Kementerian Hasil Penilaian Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
2. Hasil pengukuran indeks kualitas kebijakan pada tahun 2025 dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara pada website ikk.lan.go.id. Berdasarkan informasi pada website ikk.lan.go.id, KKP memperoleh nilai indeks kualitas kebijakan 89,15 (delapan puluh sembilan koma satu lima) dengan kategori sangat baik. Nilai tersebut telah memenuhi target indeks kualitas kebijakan pada tahun 2025 yaitu senilai 85 (delapan puluh lima) dengan kategori baik;
3. Berdasarkan Persentase Penyelesaian Penyusunan Peraturan Perundang undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat total rancangan peraturan perundang-undangan sebagai usulan kinerja peraturan perundang-undangan yang terdiri atas 65 (enam puluh lima) rancangan Peraturan perundang-undangan yang terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan 38 (tiga puluh delapan) rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, adapun persentase capaian kinerja Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 diperoleh dari jumlah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah selesai pada triwulan IV 18 (delapan belas) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan 12 (dua belas) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang masuk dalam program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 serta 9 (sembilan) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan 26 (dua puluh enam) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang diusulkan melalui mekanisme izin prakarsa dibagi dengan jumlah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang direncanakan yaitu sejumlah 35 (tiga puluh lima), kemudian dikalikan 100%, sehingga persentase capaian pada triwulan IV yaitu sebesar 216,67%;

4. Berdasarkan persentase permasalahan hukum di luar jalur pengadilan/litigasi yang tertangani, terdapat 17 (tujuh belas) Permasalahan dari Target 9 (sembilan) permasalahan sehingga capaiannya sebesar 188,88%;
5. Berdasarkan persentase Permasalahan Hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi di KKP, terdapat 11 (sebelas) permasalahan dari target 6 (enam) permasalahan dalam satu tahun sehingga capaiannya 183,33%;
6. Berdasarkan presentase perjanjian nasional yang siap untuk ditandatangani pada triwulan IV, terdapat terdapat 50 (lima puluh) dari target 35 (tiga puluh lima) dokumen legal drafting perjanjian nasional yang ditindaklanjuti dan diberikan masukan/tanggapan oleh Biro Hukum, sehingga capaian kinerja mencapai 142,86%;
7. Berdasarkan presentase perjanjian internasional dan instrumen hukum internasional bidang kelautan dan perikanan yang diberikan pertimbangan hukum hingga triwulan IV, terdapat 22 (dua puluh dua) dari target 12 (dua belas) konsep naskah perjanjian internasional yang diberikan pertimbangan hukum, dalam hal ini antara Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain atau organisasi internasional, sehingga capaian kinerja sebesar 183%;

8. Berdasarkan Surat Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN Nomor PHN.4-3.HN.03.05-166, tanggal 17 Oktober 2025, hal Pemberitahuan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2024, JDIH KKP memperoleh nilai 98 (sembilan puluh delapan) dengan kategori Eka Acalapati;
9. Berdasarkan Surat Dinas Sekretaris Jenderal Nomor B.911/SJ/RC.610/IX/2025 tanggal 11 September 2025 perihal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2025, Biro Hukum memperoleh nilai SAKIP sebesar 89,25 dengan kategori A (Sangat Baik). Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Biro Hukum telah berjalan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Pencapaian ini menjadi refleksi atas konsistensi Biro Hukum dalam mengimplementasikan siklus manajemen kinerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara terpadu. Keberhasilan tersebut juga didukung oleh komitmen pimpinan dalam menginternalisasikan budaya kerja berorientasi kinerja dan peningkatan kapasitas pegawai dalam penyusunan dokumen perencanaan serta pelaporan kinerja.
10. Berdasarkan nota dinas Kepala biro SDM Aparatur dan Organisasi nomor 8/SJ.3/TU.210/I/2026SJ, tanggal 4 Januari 2026 hal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan KKP Triwulan IV/Semester II Tahun 2025 dan Target Capaian IP ASN KKP Tahun 2026, capaian IP ASN Biro Hukum memperoleh nilai 93,78 dengan kategori Tinggi;
11. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 136/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 12 Januari 2026, hal Capaian IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK Unit Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal, Biro Hukum melaksanakan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK melalui inventarisasi rekomendasi, penyusunan rencana tindak lanjut, koordinasi dengan Inspektorat Jenderal dan unit terkait, serta penyampaian

- bukti penyelesaian. Seluruh rekomendasi yang menjadi tanggung jawab Biro Hukum telah ditindaklanjuti dengan capaian 100%, sebagai wujud komitmen terhadap akuntabilitas dan peningkatan tata kelola keuangan yang transparan
12. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Umum Nomor 65/SJ.6/KU.130/I/2026 tanggal 9 Januari 2026, hal Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2025 Lingkup Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 Biro Hukum mencapai Rp2.071.670.301 atau 99,92% dari total pagu anggaran. Realisasi ini menunjukkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan sekaligus menggambarkan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian target kinerja;
 13. Berdasarkan nota dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Nomor 55/SJ.2/TU.140/I/2026, tanggal 7 Januari 2026, hal Capaian IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV Tahun 2025 , tidak terdapat rekomendasi atau tindak lanjut yang perlu diselesaikan oleh Biro Hukum, sehingga nilai capaian Biro Hukum mencapai 100%
 14. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Hukum Nomor 50/SJ.4/TU.210/I/2026 tanggal 6 Januari 2026, hal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2025, capaian presentase biro hukum sebesar 100%; dan
 15. Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor 1/ITJ/HK.410/I/2026 tanggal 6 Desember 2025, hal Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, penilaian pembangunan ZI menuju WBK lingkup KKP tahun 2025 berdasarkan tim penilai internal Biro Hukum telah memenuhi persyaratan sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK di lingkungan KKP Tahun 2025.



Lampiran



PERJANJIAN KINERJA BIRO HUKUM – JANUARI 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
 TELEPON (021) 3519070 (GABUNG) FAKSIMILE (021) 3523551
 LAMAN www.kkp.go.id SURTEL sej@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BIRO HUKUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Effin Martiana**

Jabatan : Kepala Biro Hukum

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA
 Sekretaris Jenderal

PIHAK PERTAMA
 Kepala Biro Hukum

[Signature]
 Rudy Heriyanto Adi Nugroho

[Signature]
 Effin Martiana

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BIRO HUKUM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Bidang Penyusunan Produk Hukum KKP	1. Indeks Reformasi Hukum KKP (Indeks)	85
	2. Indeks Kualitas Kebijakan KKP (Indeks)	85
	3. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)	100
	4. Persentase Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani (%)	100
	5. Persentase Permasalahan Hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani (%)	100
	6. Persentase Perjanjian Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Siap untuk Ditandatangani (%)	100
	7. Persentase Instrumen Hukum Internasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Diberikan Perimbangan Hukum (%)	100
	8. Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Kelautan dan Perikanan (nilai)	92
2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum	9. Nilai PM SAKIP Biro Hukum (nilai)	87
	10. Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum (Indeks)	87
	11. Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Biro Hukum (%)	100
	12. Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hukum	295
	13. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Hukum (%)	85
	14. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Bidang Penyusunan Produk Hukum KKP (%)	100
	15. Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Mendapatkan Predikat Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Biro Hukum (nilai)	75

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Legislasi, Litigasi dan Kerja Sama	8.500.000.000
2.	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	6.126.400.000
Total Anggaran Biro Hukum Tahun 2025		14.626.400.000

Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA
 Sekretaris Jenderal

PIHAK PERTAMA
 Kepala Biro Hukum

[Signature]
 Rudy Heriyanto Adi Nugroho

[Signature]
 Effin Martiana

PERJANJIAN KINERJA BIRO HUKUM – APRIL 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 18
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JEP 10041
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
 LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO HUKUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mahfudiyah**
 Jabatan : Kepala Biro Hukum

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 April 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris Jenderal



Rudy Heriyanto Adi Nugroho

PIHAK PERTAMA
Kepala Biro Hukum



Mahfudiyah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO HUKUM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Bidang Penyisipan Produk Hukum KKP	1. Indeks Reformasi Hukum KKP (indeks)	85
	2. Indeks Kualitas Kebijakan KKP (indeks)	85
	3. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)	100
	4. Persentase Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani (%)	100
	5. Persentase Permasalahan Hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani (%)	100
	6. Persentase Perjanjian Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Siap untuk Ditandatangani (%)	100
	7. Persentase Instrumen Hukum Internasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Diberikan Pertimbangan Hukum (%)	100
	8. Nilai Kinerja Pengelolaan JDIH KKP (nilai)	92
2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik lingkup Biro Hukum	9. Nilai Penilaian SAKIP Biro Hukum (nilai)	87
	10. Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Biro Hukum (indeks)	87
	11. Presentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Biro Hukum (%)	100
	12. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Hukum (%)	85
	13. Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hukum (%)	≥95
	14. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Bidang Penyisipan Produk Hukum KKP (%)	100
	15. Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Mendapat Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Biro Hukum (nilai)	75

Data anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Legislasi, Litigasi dan Kerjasama	7.885.756.000
2	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	6.740.644.000
Total Anggaran Biro Hukum Tahun 2025		14.626.400.000

Jakarta, April 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris Jenderal



Rudy Heriyanto Adi Nugroho

PIHAK PERTAMA
Kepala Biro Hukum



Mahfudiyah